



Katalog BPS: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2005-2010



Badan Pusat Statistik - Indonesia

NERACA ARUS DANA INDONESIA

2005 - 2010

<http://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN NAD TAHUNAN INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK, BANK INDONESIA, DAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

**NERACA ARUS DANA INDONESIA
2005 - 2010**

Katalog BPS/ BPS Catalogue : 9502002
Nomor Publikasi/ Publication Number : 07230.1102
I S S N : 0854-6967
Ukuran Buku/ Book Size : 21,5 cm x 28,5 cm
Jumlah Halaman/ Total Pages : 144 Halaman/ Pages

Naskah/Manuscript:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Gambar Kulit/Cover Design:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri/
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Diterbitkan Oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS - Statistics Indonesia

Dicetak Oleh/Printed by:

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/
*May be cited with reference to the source***

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2005-2010 adalah publikasi yang menyajikan gambaran serta informasi mengenai data investasi di Indonesia selama periode 2005 – 2010. Data yang disajikan mencakup informasi mengenai perkembangan investasi finansial dan investasi non finansial tahunan dalam berbagai kategori transaksi finansial yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (sektor institusi). Sektor institusi dalam publikasi ini terdiri dari: Bank Sentral, Perbankan, Bukan Bank, Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Bisnis/Swasta, dan Luar Negeri. Khusus untuk sektor Bukan Bank yang terdiri dari Pegadaian, Dana Pensiun, Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan, pada publikasi ini juga disajikan tersendiri baik dalam ulasan maupun tabel NAD-nya.

Publikasi NAD Tahunan ini merupakan perwujudan dari hasil kerjasama Tim Penyusunan NAD Indonesia Tahunan yang terdiri dari unsur-unsur di Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) khususnya Direktorat Statistik Ekonomi Moneter, dan Kementerian Keuangan khususnya di BAPPEPAM-LK.

Publikasi ini adalah terbitan kedua puluh satu serta merupakan kelanjutan dari publikasi-publikasi NAD Tahunan sebelumnya yang disajikan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik. Sajian yang ditampilkan pada publikasi ini masih mengikuti format publikasi NAD tahun sebelumnya baik dari segi pembagian sektor institusi maupun kategori transaksi finansialnya. Namun beberapa angka yang disajikan dalam publikasi ini telah mengalami perbaikan dan disesuaikan dengan data pendapatan nasional yang telah direvisi.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi NAD Tahunan baik dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, maupun dari Kementerian Keuangan yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2011

DEPUTI BIDANG

NERACA DAN ANALISIS STATISTIK, BPS RI

SLAMET SUTOMO

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum	5
2.2 Kerangka Teori NAD	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional	10
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan	13
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana	15
2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD	17
BAB III KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	21
3.1 Kerangka NAD Indonesia	21
3.2 Sumber Data	28
3.3 Metode Penyusunan	32
BAB IV KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUN 2005-2010	37
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2010	37
4.2 Perkembangan Tabungan Bruto	38
4.3 Perkembangan Investasi	44
4.4 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2010	56
4.5 Percepatan Uang Beredar (<i>Velocity of Money</i>) dan Pendalaman Sektor Keuangan (<i>Financial Deepening</i>)	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Neraca Arus Dana Sederhana (Triliun Rupiah)	7
Tabel 4.1	Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2005-2010 (Triliun Rupiah)	39
Tabel 4.2	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2005-2010 (Persen)	40
Tabel 4.3	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2005-2010 (Persen)	43
Tabel 4.4	Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2005-2010 (Triliun Rupiah) .	46
Tabel 4.5	Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2005-2010 (Persen) .	48
Tabel 4.6	Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2005-2010 (Persen)	49
Tabel 4.7	Struktur <i>SI Gap</i> Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2005-2010 (Persen)	51
Tabel 4.8	Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2010 (Triliun rupiah)	54
Tabel 4.9	Komposisi Penempatan SBI oleh Masing-Masing Sektor, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	55
Tabel 4.10	Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	56
Tabel 4.11	Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	59
Tabel 4.12	Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	60
Tabel 4.13	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	61
Tabel 4.14	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	64
Tabel 4.15	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Dana Pensiun, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	65
Tabel 4.16	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	66
Tabel 4.17	Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto, Tahun 2005 - 2010	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Perkembangan Investasi Indonesia, Tahun 2005-2010 (Triliun Rupiah)	44
Grafik 4.2	Proporsi Investasi Indonesia, Tahun 2009 dan 2010 (Persen).	44
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia, Tahun 2005-2010 (Persen) .	45
Grafik 4.4	S-I gap Sektor-Sektor Keuangan dan Bukan Keuangan, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	52
Grafik 4.5	Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-Sektor LKBB, Tahun 2010	57
Grafik 4.6	Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)	57
Grafik 4.7	Proporsi Pinjaman Neto LKBB Menurut Sektor, Tahun 2010	58
Grafik 4.8	Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2009 dan 2010 (Triliun Rupiah)	63
Grafik 4.9	Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB, Tahun 2005 - 2010 (Persen)	70
Grafik 4.10	Velocity of Money, Tahun 2005 - 2010	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	<i>L1-1-L1-11</i>
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	<i>L2-1-L2-9</i>
Lampiran 3. Matrik NAD Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	<i>L3-1-L3-12</i>
Lampiran 4. Matrik NAD Menurut Sektor	<i>L4-1-L4-17</i>

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang secara lengkap menggambarkan penggunaan **tabungan** dan **sumber dana lainnya** untuk membiayai **investasi yang dilakukan** oleh **sektor-sektor institusi** pada periode waktu tertentu. Neraca Arus Dana (NAD) juga menggambarkan arus transaksi finansial antar berbagai sektor institusi melalui (menggunakan) berbagai jenis instrumen finansial pada periode waktu tertentu.

Tabungan dalam istilah NAD merupakan selisih antara **penerimaan** dengan **pengeluaran** dari kegiatan ekonomi. **Penerimaan** meliputi, surplus usaha dari kegiatan memproduksi barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi yang dimiliki (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). **Pengeluaran** mencakup pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll), dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Tabungan dalam konteks ini adalah tabungan bruto, yaitu tabungan (sesuai penjelasan diatas) ditambah dengan penyusutan barang modal.

Tabungan merupakan salah satu sumber untuk melakukan investasi. **Sumber lainnya** untuk berinvestasi adalah penerimaan yang berasal dari transaksi keuangan seperti, penerimaan dari hasil penerbitan saham/obligasi, penerimaan kredit, dan sebagainya. Sedangkan **investasi yang dilakukan** oleh berbagai sektor institusi mencakup **investasi finansial** dan **investasi non finansial (investasi riil)**. **Investasi finansial** adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor institusi dengan menggunakan berbagai instrumen finansial seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), kredit, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), surat berharga jangka pendek, dan sebagainya. **Investasi non finansial (investasi riil)** mencakup penambahan serta pengurangan barang-barang modal dan inventori (stok) yang dilakukan oleh suatu sektor institusi. **Sektor-sektor institusi** dalam Neraca Arus Dana tahunan dibagi dalam 3 sektor besar yaitu: **sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan, dan sektor Luar Negeri**. Sektor Keuangan terdiri dari sub sektor Bank Sentral, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sektor Bukan Keuangan meliputi sub sektor Rumah Tangga,

Pemerintahan Umum, Perusahaan Pemerintah, dan Perusahaan Swasta. Sedangkan Luar Negeri merupakan sektor tersendiri yang terpisah dari sektor-sektor lainnya.

NAD disajikan dalam bentuk matrik, yaitu suatu sajian dalam bentuk tabel yang terdiri dari **baris** dan **kolom**. **Baris** pada matrik NAD menunjukkan kategori transaksi, yaitu jenis-jenis transaksi baik transaksi finansial maupun non finansial, seperti pembentukan modal tetap bruto, kredit, saham, surat berharga jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan **kolom** pada matriks NAD menunjukkan pembagian sektor-sektor institusi. Setiap sektor institusi mempunyai dua kolom yaitu **kolom penggunaan** dan **kolom sumber**. **Kolom penggunaan** digunakan untuk mencatat semua perubahan (arus) aset (harta) baik aset finansial maupun aset non finansial, sedangkan **kolom sumber** digunakan untuk mencatat perubahan (arus) kewajiban finansial dan ekuiti.

NAD dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dapat dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). NAD merupakan sistem data tertutup yang di dalamnya melibatkan sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem data tertutup berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah arus penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah arus sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Pada masing-masing sektor berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan perubahan kewajiban ditambah perubahan ekuiti.

Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya ekonomi finansial selama tahun 2005 hingga 2010 dapat dideteksi melalui matrik NAD 2005 – 2010. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro adalah **tabungan bruto, investasi non finansial, S-I gap** dan **investasi finansial**.

Perkembangan tabungan bruto selama tahun 2005 – 2010 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 36,53 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 53,25 persen. Jika

melihat level tabungan pada masing-masing sektor, selama periode tersebut sektor Perusahaan (Perusahaan Swasta & Perusahaan Pemerintah) mempunyai level tabungan yang tertinggi. Disamping mempunyai level tertinggi, sektor perusahaan juga mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan tabungan secara keseluruhan. Peranan sektor keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto, relatif kecil yaitu berkisar antara 2,86 persen hingga 6,83 persen. Sedangkan sektor Luar Negeri mempunyai level tabungan yang paling kecil dimana kontribusi sektor ini terhadap pembentukan tabungan bruto berkisar antara minus 9,74 persen hingga positif 2,25 persen. Sampai dengan tahun 2006 sektor ini mengalami tabungan yang negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran hutang Indonesia ke Luar Negeri masih lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Indonesia dari Luar Negeri. Mulai tahun 2007 hingga 2010 tabungan bruto sektor luar negeri sudah kembali positif.

Berkaitan dengan investasi non finansial, secara total nilainya sama dengan tabungan bruto ($S = I$), sehingga pola perkembangan investasi non finansial sama dengan pola perkembangan tabungan bruto. Namun dilihat secara sektoral, tabungan bruto dan investasi non finansial memiliki nilai yang berbeda. Selama periode 2005-2010 kegiatan investasi non finansial sebagian besar dilakukan oleh sektor Bukan Keuangan dimana kontribusinya sebesar 99,39 persen dari total investasi non finansial. Sisanya sebesar 0,61 persen dilakukan oleh sektor Keuangan. Dalam sektor Bukan Keuangan, sub sektor Perusahaan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan subsektor lainnya, yaitu sebesar 76,26 persen. Sisanya merupakan kontribusi sub sektor Pemerintah dan Rumah Tangga. Kontribusi sektor Keuangan terhadap investasi non finansial nasional tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2005-2010, rata-rata kontribusi sektor itu tidak mencapai 1 persen. Minimnya investasi non finansial yang dilakukan sektor ini karena investasi yang dilakukan sebagian besar dalam bentuk investasi finansial seperti giro, deposito, surat berharga, surat utang negara, dan sebagainya. Kegiatan investasi non finansial hanya bisa dilakukan oleh sektor domestik, sehingga nilai investasi non finansial sektor Luar Negeri kosong.

Jika tabungan bruto dikaitkan dengan investasi non finansial, maka terdapat suatu istilah yang disebut *S-I Gap* (Saving Investment Gap). *S-I Gap* merupakan selisih antara tabungan bruto dengan investasi non finansial. Jika suatu sektor mempunyai *S-I Gap* yang positif (*net lending*), maka sektor tersebut dapat menyalurkan kelebihannya ke sektor-

sektor yang mempunyai *S-I Gap* negatif (*net borrowing*). Sektor yang mempunyai *S-I Gap* negatif berarti terdapat kekurangan dana untuk membiayai investasi non finansialnya, kekurangan tersebut dapat ditutup dari sektor lainnya.

Selama periode 2005 -2010 *S-I Gap* sektor Bukan Keuangan relatif berfluktuatif dan pada umumnya negatif (*net borrowing*). Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik yang dilakukan sektor ini (terutama sub sektor Bisnis dan Perusahaan Pemerintah) pada umumnya tidak dapat dibiayai dari tabungan brutonya. Hal ini tidak lepas dari karakteristik kedua sektor tersebut yang tujuan utamanya menghasilkan barang dan jasa, sehingga dalam prosesnya biasanya memerlukan investasi yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh tabungan brutonya. *S-I Gap* pada sektor Keuangan selama 2005-2010 angkanya selalu positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih mempunyai kelebihan (surplus) dana yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi sektor lainnya maupun untuk membiayai investasi finansialnya. Pada sektor Luar Negeri selama tahun 2005 - 2006 *S-I Gap* nya selalu negatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengurangi kegiatan investasi non finansialnya serta mengindikasikan telah terjadinya *capital inflow*. Namun pada tahun 2007 – 2010 *S-I Gap* sektor ini selalu positif.

Selain investasi non finansial, investasi finansial juga perlu mendapat perhatian. Pada umumnya peran investasi finansial lebih dominan dari investasi non finansialnya. Pada tahun 2010 kontribusi investasi finansial terhadap total investasi mencapai 60,4 persen. Sedangkan pada tahun 2008 peran investasi non finansial justru lebih dominan yaitu sebesar 69,8 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 terjadi perlambatan pertumbuhan investasi finansial dibandingkan investasi non finansialnya. Kondisi tersebut terjadi akibat krisis perekonomian global pada tahun 2008 dimana kondisi pasar modal sempat terpukul. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan investasi finansial mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 110,7 persen di tahun 2007 menjadi minus 71,9 persen di tahun 2008. Namun di tahun 2009 hingga tahun 2010 kondisi tersebut berangsur kembali normal.

Hal menarik yang terjadi selama tahun 2009 dan tahun 2010 adalah fenomena mengalirnya arus modal masuk (*capital inflow*) jangka pendek yang cukup deras dari luar negeri ke pasar keuangan Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari keadaan stabilitas makroekonomi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang positif serta imbal hasil

yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Namun di sisi lain, aliran modal masuk yang begitu cepat juga harus diwaspadai, karena akan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan jika terjadi pembalikan arus modal keluar secara cepat (*suddenly reversal capital*) yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Hal lain yang menarik disimak adalah fenomena penempatan dana sektor Perbankan. Pada tahun 2010 sektor Perbankan lebih banyak menyalurkan dananya di sektor riil melalui instrument kredit. Hal ini terkait dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional dan kebijakan bank sentral yang menetapkan suku bunga acuan atau *BI Rate* tetap rendah. Meningkatnya kredit di sektor riil juga menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan menjadi telah berjalan dengan baik dan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek perekonomian kedepan cukup baik. Membaiknya stabilitas makroekonomi juga berdampak pada cadangan devisa. Sampai dengan tahun 2010 cadangan devisa meningkat sebesar 225,8 triliun rupiah atau setara 24,41 miliar dolar AS. Sehingga posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2010 mencapai 114 miliar dolar AS atau setara dengan 6,5 bulan I impor barang dan jasa serta pembayaran utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

Bicara mengenai sektor-sektor yang berperan dalam intermediasi perekonomian suatu wilayah, maka peran perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) cukup strategis dan berpotensi besar dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Selama tahun 2010, tabungan bruto yang tercipta oleh seluruh perusahaan dalam LKBB mencapai 22,56 triliun rupiah. Pada saat yang sama investasi non finansialnya juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 13,58 triliun rupiah. Disamping meningkatkan investasi non finansialnya, LKBB juga berupaya meningkatkan investasi finansialnya. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial (94,90 persen), sisanya dalam bentuk aset non finansial. Selama tahun 2010 LKBB berhasil meningkatkan aset finansialnya sebesar 149,52 triliun rupiah atau turun 37,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kewajibannya hanya bertambah sebesar 140,54 triliun rupiah. Kekurangan pembiayaan sebesar 8,97 triliun rupiah dibiayai dari *S-I gap* nya.

Hal lain yang juga menarik untuk diketahui dalam kaitannya dengan stabilitas keuangan moneter adalah masalah percepatan uang beredar (*Velocity of Money*) dan pendalaman sektor finansial (*financial deepening*). *Velocity of Money* (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Jika V rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika V tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi. Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan menghitung rasio PDB terhadap M1, dimana M1 adalah posisi uang beredar sempit. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2005 – 2010 juga menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 yang hanya berada di kisaran angka 8,78 – 10,88. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2005–2010 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

Disisi lain, pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menarik eksese likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi. Indikator untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio M2/PDB, dimana M2 adalah posisi uang beredar luas.

Kondisi *financial deepening* Indonesia selama periode 2005 – 2010 menunjukkan bahwa sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Hal itu tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. *Financial deepening* terus menunjukkan penurunan sejak krisis 1997/1998. Krisis keuangan global pada tahun 2008 terlihat semakin menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2010, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah yaitu sebesar 38,21 persen dan kemudian sedikit meningkat di tahun 2010 menjadi 38,47 persen. Pada sisi lain, kondisi sektor Keuangan yang dangkal memungkinkan Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Sektor Keuangan Indonesia

yang dangkal menjadikan sistem keuangan Indonesia sedikit terisolasi dari tekanan depresiasi atas beragamnya aset finansial yang berasal dari luar negeri.

<http://www.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Peranan lembaga keuangan ini pada masa lalu kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah sejak permulaan dasawarsa 1980 mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna sebagai masukan dalam

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi real merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya.² Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambar dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambar. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan di atas, Badan Pusat Statistik sejak tahun 1987 telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas, namun usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya telah berhasil disusun NAD Indonesia 1984-1988, yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun secara berkala NAD Indonesia. Publikasi NAD ke-20 ini mencakup periode

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2, New York 1968.

2005-2010, yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa mendatang usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2004-2009 merupakan publikasi kedupuluh yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro, yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarkan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of income*, dan penyebab "*financial deepening*" berdasarkan data NAD 2005-2010.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Selain itu dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan dijelaskan pula di akhir bab ini.
- Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.

Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2010, Perkembangan Tabungan Bruto, Perkembangan Investasi, Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2010, Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) dan Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

<http://www.bps.go.id>

BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta non finansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena memasukkan sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca-neraca itu menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa sehingga dikenal juga dengan sebutan neraca riil. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor riil.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³ Transaksi finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$.

Umumnya pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran, sebaliknya sektor Swasta Non Finansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor Swasta Non Finansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Sektor lainnya, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. Padahal NAD hanya mencatat perubahan dalam setahun. Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor Keuangan, Rumah Tangga, Pemerintah, Bisnis dan Luar Negeri. Sektor Luar Negeri memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk Indonesia. Selain itu, dalam contoh ini hanya mencantumkan beberapa jenis kategori transaksi.

**TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)**

TRANSAKSI	KEUANGAN		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH		BISNIS		LUAR NEGERI		TOTAL	
	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
0100 Tabungan Bruto		1		19		6		15		3		44
0200 Perolehan Barang Modal	1		9		8		26		0		44	
0300 Pinjaman Neto	0		10		-2		-11		3		0	
0400 Selisih Statistik	0		2		-1		0		-1		0	
0500 Inv. Finansial Neto	0		8		-1		-11		4		0	
0600 Jumlah Penggunaan Finansial	14		12		5		13		16		60	
0700 Jumlah Sumber Finansial		14		4		6		24		12		60
0800 Cadangan Valas		1							1		1	1
1000 Deposito		6	3		3		1		-1		6	6
1100 Surat Berharga (Jangka Pendek)	1	3			1		1				3	3
1200 Pinjaman	13			4		4		6	11	10	24	24
1300 Modal dan Penyertaan			2		1			4	1		4	4
1400 Surat Berharga (Jangka Panjang)						-1			-1		-1	-1
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun		2	2								2	2
1800 Kredit Dagang							11	10	1	2	12	12
9000 Rupa-rupa		2	5			3		4	4		9	9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor Rumah Tangga mempunyai kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto sebesar 19 triliun rupiah, sedangkan tabungan bruto sektor Pemerintah hanya sebesar 6 triliun rupiah. Sektor Rumah Tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan modal sebesar 9 triliun rupiah, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di sektor Rumah Tangga berupa Deposito, Modal dan Penyertaan, Cadangan Asuransi dan Pensiun, serta Rupa-rupa masing-masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor Rumah Tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah 12 triliun rupiah. Pada saat yang bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar 4 triliun rupiah. Berdasarkan persamaan akuntansi, Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto, karena Pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih

statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi dari sumber data yang berbeda. Pinjaman Neto diperoleh dari neraca riil, sedangkan Investasi Finansial Neto dari neraca finansial. Pada tabel 2.1 untuk sektor Rumah Tangga tampak bahwa Pinjaman Neto sebesar 10 triliun rupiah dan Investasi Finansial neto 8 triliun rupiah, atau terdapat selisih statistik sebesar 2 triliun rupiah. Perilaku sektor Bisnis berbeda dengan Rumah Tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan penyusutan, yang menghasilkan Tabungan Bruto sebesar 15 triliun rupiah. Pembentukan Modal sektor Bisnis sebesar 26 triliun rupiah melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Akibatnya sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar 11 triliun rupiah. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewajiban finansial sebesar 24 triliun rupiah. Sebagian dari dana tersebut (13 triliun rupiah) digunakan untuk membeli harta finansial dan sisanya sebesar 11 triliun rupiah merupakan pinjaman neto. Pada tabel 2.1 tampak bahwa untuk sektor Bisnis, Pinjaman Neto sama dengan Investasi Finansial Neto, sehingga selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor Keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi peranan sektor ini sangat besar bagi kegiatan pasar finansial, khususnya bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Dalam tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan dana dari kegiatannya berupa Tabungan Bruto sebanyak 1 triliun rupiah, sama dengan penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol. Namun jumlah penambahan harta finansial sektor Keuangan cukup besar, yaitu sebesar 14 triliun rupiah yang berasal dari surat berharga jangka pendek sebesar 1 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 13 triliun rupiah. Sumber dana atau penambahan jumlah kewajibannya juga sebesar 14 triliun rupiah yang merupakan pertambahan kewajiban Deposito sebesar 6 triliun rupiah dan sisanya 8 triliun rupiah merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara penambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula Pinjaman Neto dan selisih statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar 6 triliun rupiah, tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah 8 triliun rupiah, sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebesar 2 triliun rupiah. Dari sisi kewajiban (sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar 4 triliun rupiah dan

3 triliun rupiah berupa kewajiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali Obligasi Pemerintah yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar 1 triliun rupiah. Dengan demikian jumlah seluruh penambahan kewajiban sektor Pemerintah menjadi 6 triliun rupiah. Kalau dilihat dari sisi harta (penggunaan), jumlah penggunaan finansialnya sebesar 5 triliun rupiah yang terdiri penambahan Deposito, Surat Berharga Jangka Pendek, dan Penyertaan Modal. Perbedaan antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah $5 \text{ triliun rupiah} - 6 \text{ triliun rupiah} = \text{minus} 1 \text{ triliun rupiah}$. Pada hal Pinjaman Netonya minus 2 triliun rupiah, sehingga menimbulkan selisih statistik minus 1 triliun rupiah.

Sektor Luar Negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk NAD. Defisit neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar 3 triliun rupiah (lihat Tabel 2.1). Angka ini menunjukkan surplus sebesar 3 triliun rupiah dari sudut pandang luar negeri dan besaran ini dimasukkan pula ke dalam kategori Tabungan Bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak mempunyai investasi riil. Dalam NAD, sektor Luar Negeri mempunyai klaim finansial atas modal fisik, tidak dalam pembentukan modal secara langsung, sehingga nilainya sama dengan nol. Pada sisi penggunaan, sektor ini meningkatkan jumlah harta finansialnya sebesar 16 triliun rupiah, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sejumlah 11 triliun rupiah. Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau penambahan kewajiban terhadap Indonesia sejumlah 12 triliun rupiah. Dengan demikian investasi finansial netonya $16 - 12 = 4 \text{ triliun rupiah}$ tidak sama dengan Pinjaman Netonya (3 triliun rupiah), sehingga terjadi selisih statistik sejumlah 1 triliun rupiah.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansial dicatat dua kali, satu sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap harta finansial suatu sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima (kewajiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar 24 triliun rupiah (ditunjukkan dalam Tabel 2.1 pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta non finansial atau investasi riil sebesar 44 triliun rupiah.

Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam matriks NAD. Misalnya Deposito, yang merupakan kewajiban sektor keuangan meningkat sebesar 6 triliun rupiah. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Pada tabel 2.1, jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa sektor Rumah Tangga dan Pemerintah menambah hartanya masing-masing sebesar 3 triliun rupiah, sektor Bisnis menambah 1 triliun rupiah, sedangkan sektor Luar Negeri menurunkan hartanya sebanyak 1 triliun rupiah.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1), Ccadangan Aasuransi Jjiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor Asuransi dan sebaliknya merupakan harta (sisi penggunaan) bagi sektor Rumah Tangga. Ternyata hubungan semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD.⁴

Jika tabel 2.1 diperhatikan kembali, kenaikan harta berupa modal pada sektor Rumah Tangga sebesar 2 triliun rupiah mungkin berasal dari Modal Saham tahun yang lalu dan Modal yang disimpan oleh sektor Keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Pada sistem neraca nasional (*integrated system of national accounts*) setidaknya menyajikan 4 (empat) neraca pokok yaitu: neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun menurut komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan besarnya tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiayai pembentukan modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri memperlihatkan transaksi dengan Luar Negeri, baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor dan impor) maupun dalam bentuk pinjaman dan transfer modal.

⁴ Sebenarnya NAD dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah tidak dapat diketahui secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penyajian kedua, yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab IV.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran dengan neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran (*Income and Outlay Accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca Pendapatan dan Pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat disetarakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Pada sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun non finansial (disebut *current expenditure*). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran selanjutnya dicatat pada Neraca Modal (*Capital Finance Accounts*) yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Bruto atau harta riil yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori. NAD juga mencatat pembelian neto barang tak berwujud, seperti: Hak Paten dan Nama Baik (*Goodwill*), walaupun data semacam itu tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, dan Neraca Modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja. NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD, surplus/defisit pada neraca pembayaran adalah negatif/positif pada tabungan di sektor Luar Negeri. Bagian Neraca Modal dalam Neraca Pembayaran mencatat transaksi luar negeri menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

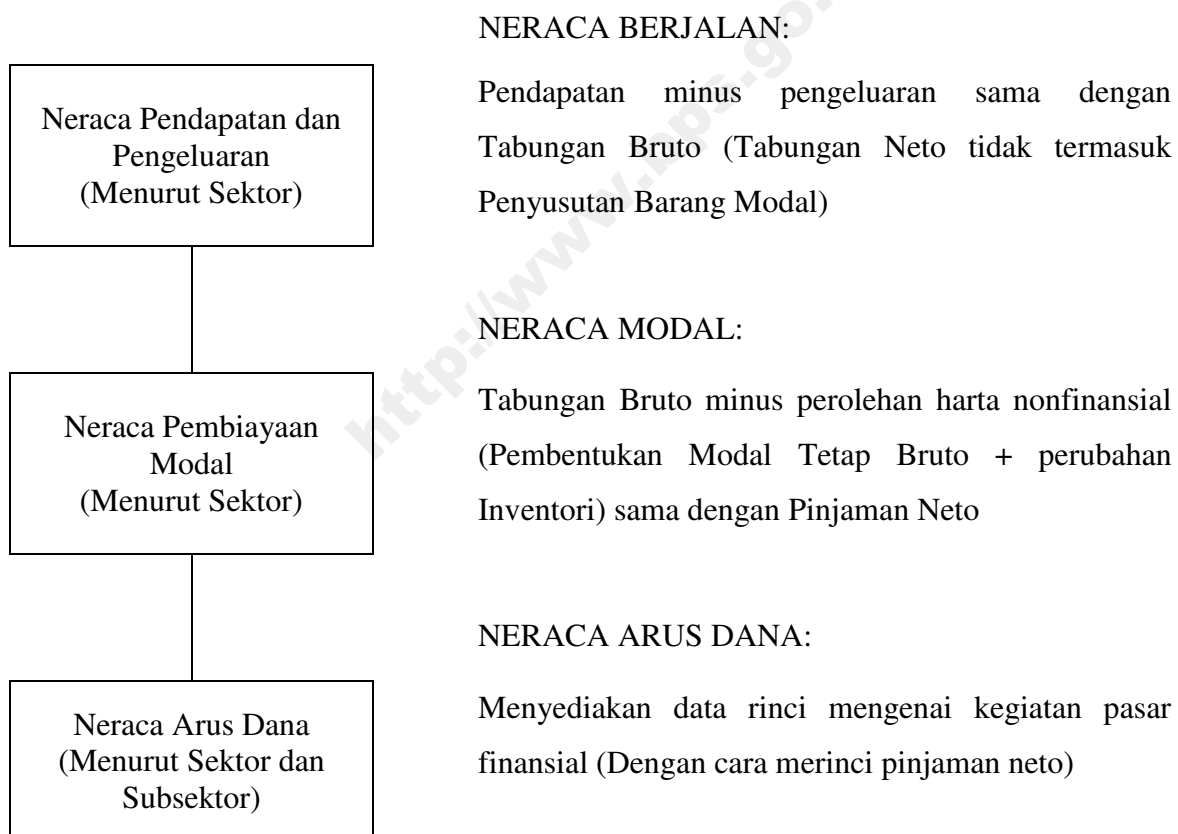
Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca

pendapatan nasional. Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan Tabungan Bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam Neraca Modal digambarkan bagaimana

barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara Tabungan Bruto yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran dengan jumlah Pembentukan Barang Modal merupakan Pinjaman Neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya Pinjaman Neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Pada umumnya perusahaan mempunyai paling sedikit dua jenis laporan keuangan yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu waktu tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi

$$\mathbf{HARTA = KEWAJIBAN}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan bagian yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat diubah menjadi

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta riil dan harta finansial. Harta riil mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

HARTA RIIL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL

atau

HARTA RIIL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL DAN PENYUSUTAN (MP)

Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut:

$$\mathbf{HR_t + HF_t = U_t + MP_t, \dots\dots\dots(1)}$$

dan

$$\mathbf{HR_{t-1} + HF_{t-1} = U_{t-1} + MP_{t-1} \dots\dots\dots (2)}$$

Jika persamaan (1) dikurangkan dengan persamaan (2) maka akan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

$$\mathbf{\Delta HR_t + \Delta HF_t = \Delta U_t + \Delta MP_t}$$

Dengan mengganti MP_t dengan TB_t (tabungan bruto), persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi

$$\mathbf{\Delta HF_t - \Delta U_t = \Delta TB_t - \Delta HR_t \dots\dots\dots (3)}$$

Berdasarkan persamaan (3) dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi

$$\mathbf{\Delta TB_t + \Delta U_t = \Delta HR_t + \Delta HF_t \dots\dots\dots(4)}$$

Persamaan (4) memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta riil dan harta finansial). Persamaan (4) di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD

sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (*data base*), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor Swasta Non Finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk

arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah

satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tidak dapat dihindarkan. Selain kelemahan sumber data, terdapat beberapa keterbatasan NAD lainnya yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data akan membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca, dan arus sebenarnya (*true flows*). Berikut ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai keterbatasan NAD berkaitan dengan penyusunannya.

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Akan tetapi penurunan dana (misalnya penurunan piutang dagang), belum tentu berarti penurunan kas.

2.6.2 *Konsolidasi dan Gabungan Neraca*

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun sebagai kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 *"Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"*

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (*true flows*) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu transaksi yang diakibatkan karena hal-hal berikut ini :

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya, nilai "*true flow*" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta maupun kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing menggunakan kurs yang sama. Demikian pula untuk periode sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk

mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah. Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan, hasilnya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) *Capital Gains and Losses* serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan *capital gains/losses* yang tercermin dalam laporan rugi/laba. Meskipun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan *capital gains/losses* sebagai pendapatan, karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka harus dilakukan penilaian kembali, apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD. Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain. Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada

akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Sebagai contoh, penilaian pada akhir tahun akan berbeda bila menggunakan sistem "*last in first out*" (LIFO) atau "*first in first out*" (FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena mendasarkan pada data yang ada. Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, sehingga seolah-olah terjadi penurunan level neracanya. Hal ini disebabkan karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan nonfinansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui seberapa besar tingkat kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya. Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antar kelompok. Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri dan sebagainya.⁵ Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi.⁶ Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti Rumah Tangga, Pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi

⁵ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari *International Standard Industrial Classification (ISIC)*.

serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam lima sektor, yaitu Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Luar Negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Lembaga Keuangan (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi Perusahaan adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam prakteknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, sektor-sektor di atas (kecuali Luar Negeri), dikelompokkan menurut sektor Keuangan dan Bukan Keuangan. Dengan demikian dalam analisis Neraca Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor Keuangan, Bukan Keuangan dan Luar Negeri. Sektor Keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan berfungsi sebagai penghubung atau perantara (*intermediaries institution*) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor Luar Negeri merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan nonresiden.

Dalam sektor Keuangan, paling tidak sektor Bukan Bank (Lembaga Keuangan Lainnya) dan sektor Bank harus ada. Hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa hanya sektor Bank saja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang giral, sedangkan sektor Bukan Bank tidak diizinkan melakukannya (*nonintermediaries institution*). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Selain itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini sektor Keuangan dirinci ke dalam sektor Otoritas Moneter, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Otoritas Moneter dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Perbankan terdiri dari Bank Umum atau BPUG, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah.

⁶ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

Khusus Bank Umum atau Bank Pencita Uang Giral (BPUG) secara spesifik dapat dibedakan menjadi Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, BUSN Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank campuran, dan bank asing. Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor Keuangan (bukan bank) tidak sebaik yang dimiliki sektor Perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor non bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Asuransi, Pegadaian dan Dana Pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor Asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, peranan sektor ini juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu pembentukan sektor asuransi seharusnya dibuat cukup rinci. Namun karena keterbatasan data yang tersedia, maka sektor ini masih bergabung dalam sektor Keuangan Bukan Bank. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program asuransi sosial. Jenis usaha asuransi dibedakan menjadi tiga yaitu usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi. Usaha penunjang asuransi meliputi usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi. Sedangkan program asuransi sosial meliputi program asuransi sosial yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) Jasa Raharja, PT (Pesero) Taspen, PT (Pesero) JAMSOSTEK, dan PT (Pesero) ASABRI. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lainnya terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Dana Pensiun.

Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu LKBB mencakup juga jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit. Walaupun peranan LKBB tidak sebesar sektor Bank tetapi keberadaannya cukup berarti. Suatu keunikan di dalam sistem finansial Indonesia adalah adanya sektor Pegadaian yang secara teknis operasinya masih sangat terkait dengan sektor Pemerintah. Di negara-negara lain juga terdapat sektor Pegadaian tetapi diselenggarakan oleh swasta. Lain halnya dengan sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor riil, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang

menggerakkan roda perekonomian, yakni sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG, Perusahaan Swasta, Koperasi dan Rumah Tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri dalam NAD. Sektor terakhir sebagai pelengkap sistem NAD adalah sektor Luar Negeri. Sektor ini secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk Indonesia dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor diantaranya merupakan sektor Keuangan, dan hanya 9 sektor adalah sektor Bukan Keuangan serta satu sektor Luar Negeri. Tetapi karena keterbatasan data, dalam publikasi ini hanya disajikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, terdiri dari Otoritas moneter, Perbankan, Lembaga Keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG), Bisnis (Perusahaan Swasta, dan Koperasi), Rumah Tangga dan Luar Negeri. Khusus untuk perusahaan Modal Ventura datanya masih belum memadai.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

1. *Bank Sentral*
2. *Perbankan*
 - Bank umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG)
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - Perbankan Syariah
3. *Lembaga Keuangan Lainnya*
 - Perusahaan Pembiayaan (Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan Kartu Kredit)
 - Peransuransian (Usaha Asuransi, Usaha Penunjang Asuransi dan Program Asuransi Sosial)
 - Dana Pensiun
 - Pegadaian

SEKTOR BUKAN KEUANGAN

1. *Rumah Tangga*
2. *Pemerintah (Pusat dan Daerah)*
3. *Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG)*
4. *Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial dan Koperasi)*

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 *Pembagian Kategori Transaksi*

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the the line*). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Aset (harta) Non Finansial yang dalam istilah lain disebut investasi riil. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua yaitu Penyusutan Barang Modal dan Tabungan Neto. Sedangkan Perolehan Aset Nonfinansial terdiri dari Aset yang dapat diproduksi (*produced assets*) dan aset yang tidak dapat diproduksi (*non produced assets*). *Produced assets* terdiri dari aset tetap (*fixed assets*) atau barang modal, perubahan stok, dan perolehan barang berharga. Sedangkan contoh dari *non produced assets* adalah tanah. Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional, dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus), sebaliknya jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Angka Pinjaman Neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila

angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Kalau pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, Cadangan Asuransi dan Dana Pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor Asuransi dan Dana Pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak yang hanya menggambarkan hubungan hutang dan piutang pajak antara sektor Pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan itu diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi NAD Indonesia dapat dibagi menjadi (a) Cadangan Valuta Asing Pemerintah, (b) Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya, (c) Uang dan Simpanan, (d) Surat Berharga Jangka Pendek, (e) Pinjaman, (f) Modal (*Equity*), (g) Surat Berharga Jangka Panjang dan (h) Lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas. Cadangan Valuta Asing Pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor Otoritas Moneter dengan sektor Luar Negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi Emas Moneter, *Special Drawing Right (SDR)*, Posisi Cadangan IMF, Cadangan Valuta Asing, dan lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping Otoritas Moneter, sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor Luar Negeri. Oleh karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian, dimunculkan kategori Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya.

Pada kategori Uang dan Simpanan, dirinci semua instrumen yang sebagian besar berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor lainnya pada sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori Uang dan Simpanan Dalam Valuta Asing dan Rupiah secara terpisah. Masing-

masing kategori ini dirinci lagi ke dalam Uang Kertas dan Logam, Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya, yang mencakup Tabungan Giro Pos dan Koperasi, berturut-turut untuk menampung simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi. Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, Otoritas Moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya pinjaman merupakan hutang pada bank dan institusi lain.

Pada prakteknya terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan non bank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Semua kredit atau pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen Kredit Bank Dalam Rupiah, Pinjaman Institusi Lain Dalam Rupiah, serta Pinjaman Dalam Valuta Asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit (yang berasal dari bank maupun institusi lainnya) dipecah menjadi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori Pinjaman Dalam Valuta Asing.

Setiap sektor dalam menjalankan kegiatannya tentu mempunyai Modal atau *Equity*. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara melakukan penawaran sahamnya (*go public*) di pasar modal khususnya untuk perusahaan-perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan (emiten), cara seperti itu merupakan cara memperoleh sumber dana di luar kredit perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, cara seperti itu merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas tersebut, maka dalam NAD, kategori modal dirinci lagi jenisnya menjadi kategori transaksi Modal Saham dan Penyertaan (swasta) dan Penyertaan Modal Pemerintah, yang

dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi perusahaan yang menerimanya.

Surat Berharga Jangka Panjang (Obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor Pemerintah, Lembaga Keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Bagian dari kategori ini untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan obligasi pemerintah dan obligasi lainnya tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Saat ini obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri juga telah menerbitkan obligasi untuk dalam negeri, seperti: Surat Utang Negara (SUN), dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti Cadangan Asuransi dan Pensiun, untuk sektor Asuransi dan Dana Pensiun, dan Dana Perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "*trust company*". Nampaknya investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia. Kemudian untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori Kredit Dagang. Kategori Klaim Antar Bank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antara Perbankan dan Bank Indonesia, maupun transaksi antar Perbankan.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula suatu kategori Rupa-Rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun demikian, berkaitan dengan data NAD yang disajikan dalam publikasi ini, hanya kategori transaksi yang penting dan strategis saja yang ditampilkan tersendiri, sedangkan untuk kategori transaksi lain hanya ditampilkan agregasinya.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia umumnya merupakan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Sesuai dengan pembagian sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan kode-kode transaksi NAD, sebaliknya sektor Keuangan Bukan Bank dan sektor Bukan Keuangan sebagian besar masih merupakan neraca individu perusahaan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri karena karakteristik data yang digunakan berbeda, tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun.

Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci sehingga memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula dengan perkiraan alokasinya (*counterpart accounts*) ke sektor-sektor lain. Dengan demikian data itu sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi ini juga sangat memadai sehingga memungkinkan untuk membuat perkiraan alokasinya ke sektor-sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis kegiatan yang dicakup di dalamnya. Data Perusahaan Pembiayaan diperoleh dari Bappepam-LK (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan bersangkutan. Data Perusahaan Dana Pensiun juga diperoleh dari Bappepam LK (Kementerian Keuangan) dan dari survei khusus. Survei khusus yang dilakukan untuk mengumpulkan data perusahaan pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP). Data untuk sektor Asuransi (yang meliputi tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asuransi sosial) diperoleh dari Bappepam-LK (Kementerian Keuangan) berupa neraca konsolidasi untuk masing-masing jenis usaha asuransi. Sedangkan data untuk sektor Pegadaian diperoleh langsung dari Perum Pegadaian.

3.2.4 Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan sektor-sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam

bentuk neraca. Penyusunan NAD untuk sektor ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, karena keterbatasan data hal yang serupa tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Khusus mengenai tabungan dan pembentukan modal pemerintah, datanya diperoleh langsung dari hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 *Perusahaan Pemerintah*

Perusahaan Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG. Perusahaan Pemerintah di bidang keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank sudah termasuk dalam kelompok sektor keuangan sebelumnya. BULOG, walaupun sebenarnya bukan merupakan perusahaan pemerintah tetapi untuk kepentingan penyajian, digabungkan dalam kelompok ini.

Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Kementerian Keuangan berupa neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun demikian, data yang diperoleh belum mencakup seluruh BUMN yang ada, sehingga masih diperlukan penaksiran-penaksiran. Data untuk BUMD juga diperoleh dari Kementerian Keuangan, dengan cakupan yang masih kurang memadai. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik dilakukan secara tidak langsung melalui alokasi (*counterpart accounts*) sektor-sektor lain. Sementara itu, data untuk BULOG berupa neraca akhir tahun yang cukup rinci diperoleh langsung dari lembaga bersangkutan.

3.2.6 *Perusahaan Swasta*

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD dan lembaga keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di Indonesia. Artinya belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan menyajikan data statistik keuangan sektor ini. Oleh karena itu, keberadaan sektor ini dalam NAD Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti.

Sumber data keuangan untuk sektor ini diperoleh dari Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS) NonFinansial yang dilakukan oleh BPS, serta dari data laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go-public* yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data lainnya berasal dari Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, yang

mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak. Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka data dari perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambil dari perkiraan-perkiraan lawan (*counterpart accounts*) yang tersedia di sektor lain (khususnya sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran struktur finansialnya.

3.2.7 Koperasi

Sektor Koperasi terdiri dari Koperasi Pedesaan (KUD) dan Koperasi Perkotaan (non-KUD). Data untuk penyusunan NAD sektor ini diperoleh dari beberapa sumber. Data Induk Koperasi baik yang berkaitan dengan KUD maupun non-KUD diperoleh dari Kementerian Koperasi. Data KUD diperoleh dari hasil perkiraan Kementerian Koperasi, sedangkan data non-KUD diperoleh dari estimasi hasil survei khusus terhadap 1500 koperasi. Dalam publikasi NAD Indonesia, untuk memudahkan penyajian, sektor Koperasi ini dikelompokkan dengan Perusahaan Swasta.

3.2.8 Rumah Tangga

Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun neraca akhir tahunnya. Hal ini disebabkan belum terlihat pentingnya rumah tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) yang dilakukan BPS dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak 10.000 rumah tangga.

Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio tabungan terhadap pendapatan (*saving ratio*) dan struktur perubahan harta dan kewajiban finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti: Uang, Giro, Deposito, Kredit Bank dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi (*counterpart accounts*) yang diberikan oleh sektor Bank. Data tabungan dan pembentukan modal diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.9 Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia data untuk sektor Luar Negeri diperoleh dari beberapa sumber dengan cara tidak langsung (sebagai *counterpart accounts*). Data tersebut diturunkan dari hasil perhitungan NAD untuk sektor Otoritas Moneter, Bank dan Pemerintah. Selain itu, dipertimbangkan juga data yang berkaitan dengan transaksi luar negeri yang ada pada Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*). Tabungan sektor ini sama dengan surplus berjalan yang diperoleh dari Neraca Luar Negeri, Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (a) neraca konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca asuransi yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Penyusunan Bagan Transaksi (Chart of Accounts) Sektoral

Bagan transaksi adalah suatu media antara yang secara teknis digunakan untuk mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun berdasarkan neraca baik dalam bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transaksi NAD dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan sering dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai berikut.

- i. Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transaksi NAD yang sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD

disebut Bagan Transaksi Perusahaan. Selanjutnya bagan transaksi ini dapat disederhanakan dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode kategori transaksi sama.

- ii. Bagan Transaksi Sektorial diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi Perusahaan, yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakai untuk menyusun NAD.

3.3.2 *Penghitungan Arus Finansial*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktek, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif. Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom, yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

3.3.3 *Rekonsiliasi NAD*

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk arus uang dan rekening giro sebagai sumber di Perbankan, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasional, rekonsiliasi NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isian kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor harus memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.
 - Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap atau Perolehan Harta Nonfinansial (0200).
 - Investasi Finansial Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah Sumber Finansial (0700).
 - Selisih Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investasi Finansial Neto (0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali maka Selisih Statistik ditiadakan, sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.
 - Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan dana dari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.
 - Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari berbagai instrumen finansial di kolom sumber.
- ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus dijaga. Secara nasional, data Penyusutan Barang Modal, Tabungan Neto, Pembentukan Modal Tetap dan Perubahan Stok yang diperoleh dari hasil perhitungan NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan angka-angka PDB. Dalam praktek, penyesuaian dilakukan dengan mengalokasikan perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas ke sektor-sektor yang tingkat ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya hasil perhitungan dari sektor-sektor yang tingkat ketelitiannya tinggi tetap dipertahankan.
- ii. Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat perhatian. Instrumen finansial seperti Uang, Giro, Deposito, Kredit Dagang, dan Kredit Bank mempunyai karakteristik yang berbeda. Terdapat beberapa instrumen yang hanya dapat ditransaksikan oleh sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh Giro (1022), di sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor Keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank

Indonesia tidak mengalami penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin saja diubah untuk menjaga keseimbangan dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Data tersebut umumnya diperoleh dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai, bahkan disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode.

Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NAD INDONESIA TAHUN 2005-2010

4.1. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2010

Kondisi perekonomian global sepanjang tahun 2010 menunjukkan adanya momentum perbaikan. Hal ini sejalan dengan tingginya realisasi pertumbuhan ekonomi dunia sehingga IMF melakukan revisi proyeksi ke atas. Perbaikan perekonomian dunia terutama di dorong oleh ekspansi perekonomian di negara-negara *emerging market* khususnya di wilayah asia yang mencatat pertumbuhan lebih dari 7%. Meskipun perekonomian global dibayangi krisis utang di beberapa negara eropa dan tingginya tingkat pengangguran di negara-negara maju tapi beberapa indikator perekonomian domestik menunjukkan trend positif seperti PDB, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan pergerakan kurs.

Sebagai salah satu *emerging market*, kinerja perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2010 turut berkontribusi dalam perbaikan output perekonomian global. Naiknya volume perdagangan internasional memicu kenaikan beberapa harga komoditas utama dunia yang berimplikasi pada meningkatnya komoditas ekspor dari Indonesia. Kinerja ekspor yang kuat dan di dukung oleh permintaan domestik yang tinggi mampu mempertahankan surplus transaksi berjalan. Disisi transaksi modal dan finansial, pemulihan ekonomi global telah memberikan sinyakl positif dengan makin derasnya modal masuk ke pasar domestik.

Meningkatnya keyakinan konsumen dan didukung dengan daya beli yang terus meningkat menjadi faktor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2010. Kondisi ini juga didukung oleh pertumbuhan investasi yang cukup kuat seperti terlihat dari membaiknya indeks tendesi bisnis. Kinerja investasi yang cukup baik ini terutama didukung oleh penerapan kebijakan pemerintah yang mendorong kegiatan investasi seperti peningkatan pembiayaan dan penurunan harga impor barang modal. Sementara itu, seiring penyerapan anggaran yang masih terbatas dan kebijakan fiskal yang cenderung hati-hati konsumsi pemerintah masih relatif kecil.

Kinerja ekspor yang cukup kuat juga diikuti oleh terdiversifikasinya komoditas ekspor nasional dan besarnya peran negara-negara berkembang sebagai pasar tujuan ekspor Indonesia. Membaiknya daya beli masyarakat dan membaiknya iklim investasi di dalam negeri juga meningkatnya kenaikan impor baik migas maupun non migas. Di tahun 2010, impor tumbuh sebesar 17% setelah mengalami kontraksi di tahun sebelumnya

sebesar minus 15%. Peningkatan impor ini juga didukung dengan menguatnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan barang-barang impor relatif lebih murah. Kenaikan barang impor yang cukup tinggi ini terutama disebabkan oleh impor makanan jadi dan kendaraan penumpang. Sementara itu, kenaikan impor migas terkait dengan naiknya kebutuhan BBM domestik.

Dari sisi sektoral, kinerja sektor industri pengolahan juga dalam tren yang meningkat. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar lebih dari 4%. Sektor ini berkontribusi besar dalam tumbuhnya sektor *tradable* sebesar 3,9%. Di sektor pertanian, penurunan produktivitas dan luas lahan serta anomali cuaca sepanjang tahun 2010 menyebabkan pencapaian sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sektor pertambangan juga relatif lebih rendah dari yang diharapkan karena adanya berbagai gangguan produksi minyak seperti kerusakan beberapa kilang. Sementara itu pertumbuhan sektor tradable mengalami pertumbuhan yang cukup mengesankan. Sektor ini mampu tumbuh lebih dari 8% di tahun 2010 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Kinerja sektor ini terutama didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa.

4.2. PERKEMBANGAN TABUNGAN BRUTO

4.2.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor

Definisi dari tabungan bruto dan tabungan neto disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Perkembangan tabungan bruto menurut sektor selama tahun 2005–2010 disajikan pada tabel 4.1. Selama kurun waktu 2005-2010, tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 23,88 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 53,25 persen. Demikian pula bila dilihat secara level, tabungan bruto selama periode tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terakhir pada tahun 2010 tabungan bruto mengalami peningkatan hingga Rp2.086,63 triliun (lihat tabel 4.1). Jika melihat secara sektoral, maka selama periode tersebut sektor perusahaan (swasta & perusahaan pemerintah) mempunyai level tabungan yang tertinggi dan sektor luar negeri memiliki level tabungan bruto terendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

**Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor,
Tahun 2005-2010 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	737,22	832,94	953,15	1.458,13	1.579,06	1.979,03
1. Pemerintah	108,81	181,08	168,66	229,47	155,24	219,44
2. Perusahaan	436,64	471,60	543,14	889,53	1.025,02	1.305,90
- Pemerintah	3,83	3,71	40,59	64,48	52,35	7,79
- Swasta +)	432,80	467,89	502,55	825,06	972,67	1.298,11
3. Rumah Tangga	191,77	180,26	241,34	339,13	398,81	453,70
B. KEUANGAN	73,45	53,68	28,64	87,38	119,15	31,45
4. Bank ++)	62,65	44,87	9,26	68,77	78,45	8,89
5. Bukan Bank	10,80	8,82	19,39	18,61	40,69	22,57
C. LUAR NEGERI	(71,94)	(38,46)	2,78	(36,68)	38,90	76,14
6. Luar Negeri	(71,94)	(38,46)	2,78	(36,68)	38,90	76,14
JUMLAH	738,73	848,17	984,57	1.508,83	1.737,12	2.086,63

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

**) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

4.2.2. Struktur Tabungan Bruto

Selama periode 2005-2010, sektor bukan keuangan memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan tabungan bruto. Pada tabel 4.2 terlihat bahwa kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 96,20 persen. Sedangkan persentase tertinggi dari sektor ini terhadap total tabungan bruto dicapai pada tahun 2005, yaitu sebesar 99,8 persen dan persentase terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 90,90 persen. Kondisi tersebut sedikit banyak disebabkan oleh adanya krisis ekonomi global yang melanda hampir di seluruh kawasan dunia termasuk Indonesia. Namun pada tahun 2010 struktur tabungan bruto meningkat menjadi 94,84 persen.

**Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor
Tahun 2005-2010 (persen)**

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	99,80	98,21	96,81	96,64	90,90	94,84
1. Pemerintah	14,73	21,35	17,13	15,21	8,94	10,52
2. Perusahaan	59,11	55,60	55,17	58,96	59,01	62,58
- Pemerintah	0,52	0,44	4,12	4,27	3,01	0,37
- Swasta +)	58,59	55,17	51,04	54,68	55,99	62,21
3. Rumah Tangga	25,96	21,25	24,51	22,48	22,96	21,74
B. KEUANGAN	9,94	6,33	2,91	5,79	6,86	1,51
4. Bank ++)	8,48	5,29	0,94	4,56	4,52	0,43
5. Bukan Bank	1,46	1,04	1,97	1,23	2,34	1,08
C. LUAR NEGERI	(9,74)	(4,53)	0,28	(2,43)	2,24	3,65
6. Luar Negeri	(9,74)	(4,53)	0,28	(2,43)	2,24	3,65
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Tabungan pemerintah dihitung sebagai total penerimaan pemerintah dan hibah dikurangi konsumsi final pemerintah atau sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dan hibah dikurangi pengeluaran berjalan. Peranan sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto selama periode 2005–2010 relatif lebih berfluktuasi. Pada tahun 2005, peranannya mencapai 14,73 persen dan meningkat di tahun 2006 menjadi 21,35 persen.

Adanya kebijakan percepatan pembayaran utang pemerintah ke IMF, secara otomatis akan meningkatkan pengeluaran rutin pemerintah dan menurunkan tabungan yang diciptakan oleh pemerintah. Pada tahun 2007 hingga tahun 2009 terjadi penurunan menjadi sebesar 17,13 persen pada tahun 2007, menurun sebesar 15,21 persen pada tahun 2008 dan menurun semakin dalam menjadi sebesar 8,94 persen pada tahun 2009. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh besarnya tekanan terhadap peningkatan belanja negara sebagai dampak dari tingginya harga minyak dunia yang mengakibatkan kenaikan harga BBM sejak tahun 2005. Berbagai kejadian bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu tersebut juga meningkatkan pengeluaran Pemerintah, terutama untuk merehabilitasi dan merestrukturisasi sarana dan prasarana lingkungan pada daerah-daerah yang terkena bencana. Namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan pada struktur tabungan bruto menjadi sebesar 10,52 persen sebagai dampak dari meningkatnya realisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan terlampauinya realisasi penerimaan cukai yang berkaitan dengan penyesuaian tarif cukai tembakau.

Selama periode 2005-2010, sektor perusahaan memberikan kontribusi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya, dan didominasi oleh tabungan perusahaan swasta. Peranan sektor perusahaan (perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta) terhadap pembentukan tabungan bruto selama periode tersebut cukup berfluktuasi. Pada tahun 2005 sektor ini memberikan andil sebesar 59,11 persen terhadap total pembentukan tabungan bruto. Masing-masing disumbangkan oleh perusahaan pemerintah sebesar 0,52 persen dan perusahaan swasta sebesar 58,59 persen.

Kontribusi tabungan sektor perusahaan mencapai nilai terendah pada tahun 2007 sebesar 55,17 persen, yang diciptakan oleh perusahaan pemerintah sebesar 4,12 persen dan perusahaan swasta sebesar 51,04 persen. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 62,58 persen. Besarnya nilai kontribusi tersebut disebabkan karena kenaikan peranan perusahaan swasta sebesar 62,21 persen dan kontribusi perusahaan pemerintah hanya sebesar 0,37 persen.

Struktur tabungan bruto sektor rumah tangga selama periode 2005-2010 cenderung bergerak stabil dikisaran angka 21-26 persen. Pada tahun 2005 peranan sektor rumah tangga mencapai 25,96 persen dan menurun menjadi 21,25 persen di tahun 2006. Penurunan tersebut disebabkan adanya kenaikan BBM dan menurunnya daya beli masyarakat. Namun setahun kemudian di tahun 2007 peranan tersebut kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 24,51 persen.

Pada tahun 2008-2010 secara nominal, tabungan bruto sektor rumah tangga mengalami kenaikan, namun berdasarkan kontribusinya terjadi penurunan yakni sebesar 22,48 persen pada tahun 2008 dan 21,74 persen pada tahun 2010. Hal ini disebabkan kontribusi tabungan bruto sektor perusahaan pada tahun-tahun tersebut mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga kontribusi sektor rumah tangga mengalami penurunan.

Peranan sektor keuangan (bank dan bukan bank) terhadap pembentukan tabungan bruto relatif kecil dibandingkan peranan sektor bukan keuangan. Pada tahun 2005, peranan sektor keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto hanya sebesar 9,94 persen, dengan kontribusi sektor bank sebesar 8,48 persen dan kontribusi sektor bukan bank sebesar 1,46 persen. Peranan sektor Keuangan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 2,91 persen pada tahun 2007. Hal ini seiring dengan penurunan peranan

sektor bank sebesar 0,94 persen pada tahun yang sama. Penurunan peranan sektor bank tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah bank yang beroperasi. Sedangkan peranan sektor keuangan bukan bank cenderung relatif stabil. Peranan sektor keuangan berangsur naik kembali di tahun 2008 dan 2009 yaitu menjadi 5,79 persen dan 6,86 persen. Dan mengalami penurunan menjadi sebesar 1,51 persen pada tahun 2010.

Sektor luar negeri mengalami tabungan yang negatif pada tahun 2005-2006, sehingga kontribusi sektor ini terhadap pembentukan tabungan bruto berkisar antara minus 9,74 persen hingga minus 4,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran hutang Indonesia ke luar negeri masih lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Indonesia dari luar negeri. Namun pada tahun 2007, kontribusi sektor luar negeri ini menjadi positif, yaitu 0,28 persen dan kembali negatif pada tahun 2008, yaitu minus 2,43 persen. Pada tahun 2009-2010 sektor luar negeri memberikan kontribusi tabungan yang semakin meningkat dari positif 2,24 persen pada tahun 2009 menjadi 3,65 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009-2010 pendapatan domestik dari luar negeri cukup besar.

4.2.3. Strukur Tabungan Bruto Terhadap PDB

Tabel 4.3 memperlihatkan persentase struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Secara umum persentase seluruh sektor cenderung fluktuatif, di mana peningkatan persentasenya hanya terjadi di tahun 2008, 2009, dan 2010.

Peranan terbesar dari struktur¹ ini pada periode 2005–2010 terdapat pada sektor bukan keuangan, di mana pada sektor pemerintah, persentase strukturnya cukup berfluktuatif pada periode tersebut. Persentase terkecil pada sektor pemerintah ini terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,77 persen, sedangkan yang terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 5,42 persen. Peningkatan pada tahun 2006 tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan negara serta didukung dengan peningkatan penerimaan non pajak

¹ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur di sini adalah struktur tabungan bruto terhadap PDB

TABEL 4.3 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2005-2010 (persen)

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	26,57	24,94	24,12	29,47	28,18	30,81
1. Pemerintah	3,92	5,42	4,27	4,64	2,77	3,42
2. Perusahaan	15,74	14,12	13,75	17,98	18,29	20,33
- Pemerintah	0,14	0,11	1,03	1,30	0,93	0,12
- Swasta +)	15,60	14,01	12,72	16,67	17,36	20,21
3. Rumah Tangga	6,91	5,40	6,11	6,85	7,12	7,06
B. KEUANGAN	2,65	1,61	0,73	1,77	2,13	0,49
4. Bank ++)	2,26	1,34	0,23	1,39	1,40	0,14
5. Bukan Bank	0,39	0,26	0,49	0,38	0,73	0,35
C. LUAR NEGERI	(2,59)	(1,15)	0,07	(0,74)	0,69	1,19
6. Luar Negeri	(2,59)	(1,15)	0,07	(0,74)	0,69	1,19
JUMLAH	26,63	25,40	24,92	30,49	31,00	32,49
PDB (Triliun Rp)	2.774,28	3.339,22	3.950,89	4.948,69	5.603,87	6.422,92

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

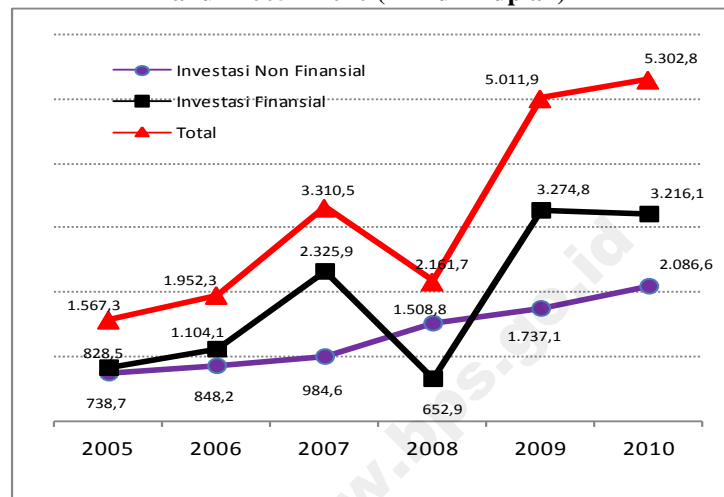
Kontribusi terbesar dari struktur ini terjadi di sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) terutama sektor perusahaan swasta. Selama periode tersebut persentase dari struktur pada sektor perusahaan swasta selalu lebih besar dibandingkan pada sektor perusahaan pemerintah. Pada tahun 2005 kontribusi sektor perusahaan sebesar 15,74 persen dan menurun menjadi 14,12 persen pada tahun 2006 hingga menjadi 13,75 persen pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008-2010 terjadi peningkatan sebesar 17,98 persen pada tahun 2008, menjadi 18,29 persen pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 20,33 persen pada tahun 2010. Peranan tabungan bruto sektor rumah tangga terhadap PDB dalam kurun waktu 2005-2010 relatif stabil, yaitu berada pada kisaran 5,40 hingga 7,12 persen, tetapi pada tahun 2010 peranannya mengalami sedikit perlambatan hingga mencapai 7,06 persen.

Pada sektor keuangan, peranan struktur tabungan brutonya terhadap PDB selama periode 2005-2010 berada pada kisaran 0,49 persen hingga 2,65 persen. Jika dilihat per sektor, maka persentase sektor bank relatif lebih besar dibandingkan sektor bukan bank. Pada sektor bank, di tahun 2005 persentasenya 2,65 persen, dan ini merupakan persentase terbesar selama periode 2005-2010. Sementara pada tahun 2005, persentase dari sektor bukan bank hanya sebesar 0,39 persen.

Struktur tabungan bruto sektor luar negeri terhadap PDB pada tahun 2005, 2006 dan 2008 selalu negatif, sedangkan selama tahun 2009-2010 mulai menunjukkan angka yang positif dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,69 persen.

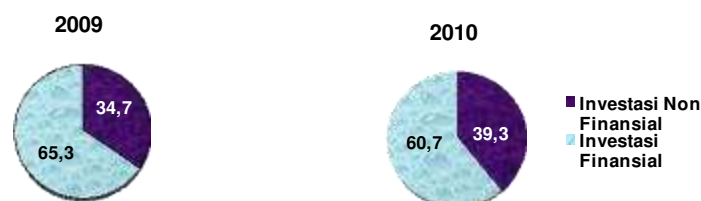
4.3. PERKEMBANGAN INVESTASI

Grafik 4.1 Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2005 – 2010 (Triliun Rupiah)



Perkembangan investasi dalam konteks ini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial terjadi akibat adanya proses perubahan (penambahan maupun pengurangan) aset non finansial berupa barang modal dan persediaan (inventori). Sedangkan investasi finansial terjadi karena adanya transaksi finansial oleh para pelaku ekonomi di pasar keuangan melalui berbagai macam instrumen finansial, seperti saham, obligasi, SBI, kredit, valas, dan sebagainya.

Grafik 4.2 Proporsi Investasi Indonesia, Tahun 2009 dan 2010 (Persen)

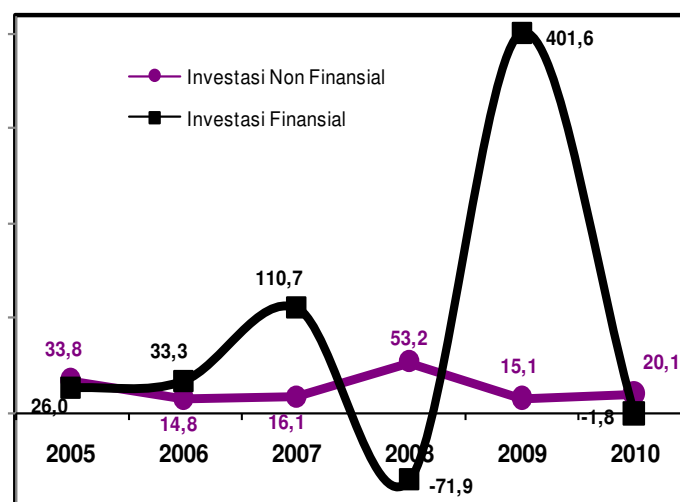


Pada umumnya peran investasi finansial lebih dominan jika dibandingkan dengan investasi non finansial. Pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan investasi finansial terhadap total investasi mencapai 60,7 persen dan investasi non finansial sebesar 39,3 persen. Sedangkan pada tahun 2009 peran investasi finansial lebih dominan yaitu sebesar 65,3 persen dan peran investasi non finansial sebesar 34,37. Hal ini disebabkan pada tahun 2009 terjadi perlambatan pertumbuhan investasi non finansial dibandingkan investasi finansialnya.

Selama periode 2005-2010 investasi non finansial menunjukkan tren yang terus meningkat. Pertumbuhan investasi ini mempunyai kecenderungan yang meningkat, namun di beberapa periode pertumbuhannya mengalami kontraksi seperti yang terjadi di tahun 2006 dan 2009. Pada tahun 2006 pertumbuhan investasi non finansial ini hanya sebesar 14,8 persen jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 33,8 persen. Begitu pula pada tahun 2009, di mana pertumbuhan investasi non finansial hanya sebesar 15,1 persen dibandingkan pada tahun 2008 pertumbuhannya mencapai angka tertinggi yaitu 53,2 persen.

Penurunan pertumbuhan pada tahun 2006 dipengaruhi oleh menurunnya investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan dari luar negeri serta alat angkutan dari dalam negeri, sedangkan penurunan investasi non finansial di tahun 2009 lebih banyak disebabkan perubahan inventori yang negatif akibat berkurangnya inventori (stok) nasional.

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia, Tahun 2005 – 2010 (Persen)



Investasi finansial sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global. Ketika terjadi krisis perekonomian global pada tahun 2008, kondisi pasar modal sempat terpuruk. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan investasi finansial mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 110,7 persen di tahun 2007 menjadi minus 71,9 persen di tahun 2008. Kondisi tersebut dapat kembali normal di tahun 2009, bahkan pertumbuhannya di tahun tersebut melesat jauh hingga sebesar 401,6 persen.

4.3.1. Investasi Non Finansial

a. Investasi Non-Finansial Menurut Sektor

Dalam teori ekonomi makro dijelaskan bahwa tabungan bruto dan investasi non finansial apabila dilihat secara total², akan bernilai sama. Tetapi jika dilihat secara sektoral maka antara tabungan bruto dan investasi non finansial dapat memiliki nilai yang berbeda. Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional sama dengan pola perkembangan tabungan bruto.

**Tabel 4.4 Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2005-2010 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	732,82	843,47	981,22	1.499,56	1.725,16	2.071,50
1. Pemerintah	90,21	113,72	133,69	181,31	189,83	168,11
2. Perusahaan	609,18	698,33	685,75	1.131,72	1.320,02	1.685,61
- Pemerintah	70,46	78,01	75,51	114,54	110,37	28,10
- Swasta +)	538,73	620,32	610,25	1.017,18	1.209,66	1.657,51
3. Rumah Tangga	33,43	31,42	161,77	186,53	215,30	217,78
B. KEUANGAN	5,91	4,70	3,36	9,27	11,96	15,13
4. Bank ++)	4,87	3,13	3,16	6,33	5,76	1,54
5. Bukan Bank	1,04	1,57	0,20	2,94	6,21	13,59
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	738,73	848,17	984,57	1.508,83	1.737,12	2.086,63

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

***) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

² Artinya penjumlahan tabungan bruto dan investasi non finansial dari seluruh sektor

Tabel 4.4 menjelaskan mengenai perkembangan investasi non finansial menurut sektor selama tahun 2005-2010. Pada tahun 2010 sektor bukan keuangan menciptakan investasi non finansial sebesar Rp2.071,50 triliun. Sektor perusahaan memberikan kontribusi yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar Rp1.685,61 triliun pada tahun 2010. Sedangkan sektor keuangan memberikan penciptaan investasi non finansial sebesar Rp15,13 triliun pada tahun 2010.

b. Struktur Investasi Non Finansial

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa selama periode 2005-2010 kegiatan investasi non finansial secara nasional sebagian besar dilakukan oleh sektor bukan keuangan yaitu sebesar 99,28 persen dari total investasi non finansial. Sisanya sebesar 0,72 persen dilakukan oleh sektor Keuangan. Selama periode 2005-2010, kontribusi sektor bukan keuangan terhadap investasi non finansial secara umum relatif stabil. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 99,66 persen. Namun, pada tahun 2009 kontribusinya mengalami sedikit penurunan dari 99,31 persen dan pada tahun 2010 menjadi 99,28 persen.

Penurunan tersebut diakibatkan adanya penurunan kontribusi dari sektor pemerintah dan perusahaan pemerintah. Kontribusi sektor pemerintah mengalami penurunan dari 12,02 persen pada tahun 2008 menjadi 10,93 persen di tahun 2009 dan menjadi 8,06 persen di tahun 2010. Sedangkan kontribusi sektor perusahaan pemerintah selama periode 2005-2010 semakin menurun. Pada tahun 2005 sektor perusahaan pemerintah memberikan kontribusi terhadap investasi non finansial sebesar 9,54 persen, menurun hingga mencapai 6,35 persen pada tahun 2009 dan semakin menurun menjadi 1,35 persen pada tahun 2010.

Pada sektor bukan keuangan, perusahaan (terutama perusahaan swasta) merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lainnya (pemerintah dan rumah tangga). Secara rata-rata kontribusi sektor perusahaan (pemerintah dan swasta) terhadap investasi non finansial nasional adalah sebesar 77,70 persen, sedangkan kontribusi sektor pemerintah hanya sebesar 11,70 persen, sektor rumah tangga berkontribusi sebesar 9,98 persen, dan sektor keuangan berkontribusi sebesar 0,62 persen

**Tabel 4.5 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2005-2010 (persen)**

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	99,20	99,45	99,66	99,39	99,31	99,28
1. Pemerintah	12,21	13,41	13,58	12,02	10,93	8,06
2. Perusahaan	82,46	82,33	69,65	75,01	75,99	80,78
- Pemerintah	9,54	9,20	7,67	7,59	6,35	1,35
- Swasta +)	72,93	73,14	61,98	67,42	69,64	79,43
3. Rumah Tangga	4,52	3,70	16,43	12,36	12,39	10,44
B. KEUANGAN	0,80	0,55	0,34	0,61	0,69	0,72
4. Bank ++)	0,66	0,37	0,32	0,42	0,33	0,07
5. Bukan Bank	0,14	0,18	0,02	0,19	0,36	0,65
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Kontribusi sektor keuangan terhadap investasi non finansial nasional tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2005-2010, rata-rata kontribusi sektor tersebut tidak mencapai 1 persen. Minimnya investasi non finansial yang dilakukan sektor keuangan dikarenakan investasinya sebagian besar dalam bentuk investasi finansial seperti giro, deposito, surat berharga (saham dan obligasi) swasta, surat utang negara, dan sebagainya.

Pada sektor bank, kontribusinya secara rata-rata lebih besar daripada sektor bukan bank. Sektor bank memberikan kontribusi investasi non finansial selama tahun 2005-2010 secara rata-rata sebesar 0,36 persen. Namun, secara rata-rata pertumbuhan sektor Bukan Bank lebih tinggi daripada sektor bank yang memberikan kontribusi sebesar 0,26 persen selama kurun waktu 2005-2010. Pada sektor luar negeri, investasi non finansial yang dilakukan tidak dicatat dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan karena kegiatan investasi non finansial yang dicatat dalam perekonomian nasional hanya mencakup kegiatan investasi yang terjadi di dalam negeri.

c. Strukur Investasi Non Finansial Terhadap PDB

Struktur investasi non finansial terhadap PDB selama periode 2005–2010 disajikan pada tabel 4.6. Pada tabel tersebut terlihat bahwa struktur³ tersebut berkisar antara 24,92 persen hingga 32,49 persen. Secara keseluruhan struktur tersebut cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 28,49 persen pertahun tersebut selama periode 2005-2010. Dalam kurun waktu tersebut, struktur terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 32,49 persen, sedangkan struktur terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 24,92 persen.

Tabel 4.6 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2005-2010 (persen)

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	26,41	25,26	24,84	30,30	30,79	32,25
1. Pemerintah	3,25	3,41	3,38	3,66	3,39	2,62
2. Perusahaan	21,96	20,91	17,36	22,87	23,56	26,24
- Pemerintah	2,54	2,34	1,91	2,31	1,97	0,44
- Swasta +)	19,42	18,58	15,45	20,55	21,59	25,81
3. Rumah Tangga	1,20	0,94	4,09	3,77	3,84	3,39
B. KEUANGAN	0,21	0,14	0,09	0,19	0,21	0,24
4. Bank ++)	0,18	0,09	0,08	0,13	0,10	0,02
5. Bukan Bank	0,04	0,05	0,01	0,06	0,11	0,21
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	26,63	25,40	24,92	30,49	31,00	32,49
PDB (Triliun Rp)	2.774,28	3.339,22	3.950,89	4.948,69	5.603,87	6.422,92

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

***) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

Walaupun struktur pada seluruh sektor cenderung meningkat, tetapi sejak tahun 2005 hingga 2007 mengalami penurunan dari 26,63 persen di tahun 2005 menjadi 24,92 persen di tahun 2007. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam kegiatan investasi fisik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di periode selanjutnya yakni tahun 2008-2010 struktur ini kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 30,49

³ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur disini adalah struktur investasi non finansial terhadap PDB

persen di tahun 2008 menjadi 31,00 persen di tahun 2009 dan 32,49 persen di tahun 2010.

Sektor bukan keuangan selama periode tahun 2005-2010 memiliki struktur yang paling dominan dibandingkan sektor lainnya. Struktur yang terjadi pada sektor bukan keuangan ini selama periode 2005-2010 memiliki rata-rata sebesar 28,31 persen. Pada sektor bukan keuangan, perusahaan merupakan sektor yang mempunyai struktur paling dominan dengan rata-rata sebesar 22,15 persen. Struktur dari sektor perusahaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 26,24 persen, dimana sebesar 25,81 persen disumbangkan oleh sektor perusahaan swasta dan sisanya 0,44 persen dari sektor perusahaan pemerintah. Sedangkan sektor lainnya yaitu pemerintah dan rumah tangga persentasenya hanya sebesar 2,62 persen dan 3,39 persen. Untuk sektor keuangan, selama periode 2005-2010 strukturnya terlihat cukup berfluktuasi (baik pada sektor bank maupun pada sektor bukan bank) yaitu berkisar antara 0,09 persen hingga 0,24 persen. Rata-rata persentase strukturnya untuk sektor bank sebesar 0,10 persen sedangkan pada sektor bukan bank hanya sebesar 0,08 persen.

4.3.2. Celah Tabungan dan Investasi (*S-I Gap*)

***S-I Gap* Menurut Sektor**

Tabel 4.7 menggambarkan struktur celah tabungan dan investasi (*S-I Gap*) terhadap PDB selama tahun 2005-2010. *S-I Gap* (*Saving Investment Gap*) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) maupun memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas perkembangan struktur *S-I Gap* masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode 2005-2010.

Tabel 4.7 Struktur *S-I Gap* Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2005-2010 (persen)

SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
A. BUKAN KEUANGAN	0,16	(0,32)	(0,71)	(0,84)	(2,61)	(1,44)
1. Pemerintah	0,67	2,02	0,89	0,97	(0,62)	0,80
2. Perusahaan	(6,22)	(6,79)	(3,61)	(4,89)	(5,26)	(5,91)
- Pemerintah	(2,40)	(2,23)	(0,88)	(1,01)	(1,04)	(0,32)
- Swasta +)	(3,82)	(4,56)	(2,73)	(3,88)	(4,23)	(5,60)
3. Rumah Tangga	5,71	4,46	2,01	3,08	3,27	3,67
B. KEUANGAN	2,43	1,47	0,64	1,58	1,91	0,25
4. Bank ++)	2,08	1,25	0,15	1,26	1,30	0,11
5. Bukan Bank	0,35	0,22	0,49	0,32	0,62	0,14
C. LUAR NEGERI	(2,59)	(1,15)	0,07	(0,74)	0,69	1,19
6. Luar Negeri	(2,59)	(1,15)	0,07	(0,74)	0,69	1,19
JUMLAH	-	-	(0,00)	-	-	0,00
PDB (Triliun Rp)	2.774,28	3.339,22	3.950,89	4.948,69	5.603,87	6.422,92

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

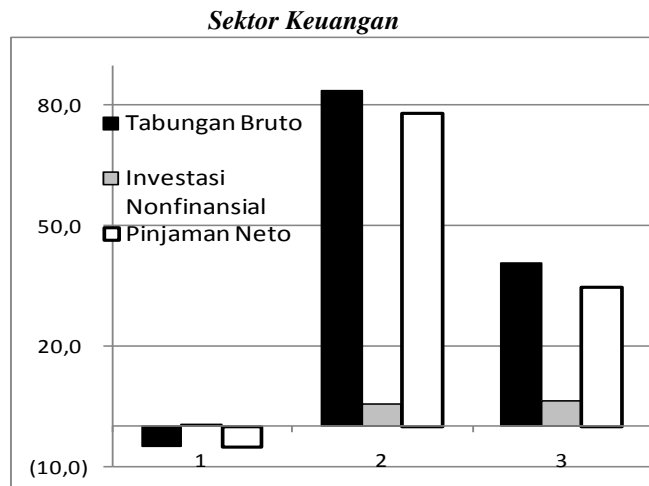
+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Sektor Bukan Keuangan

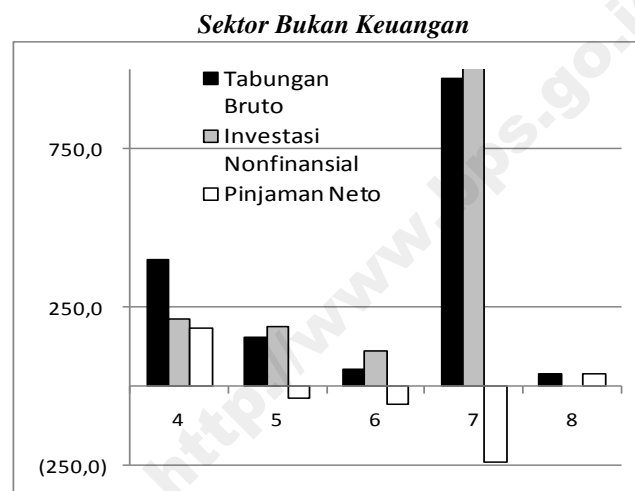
Struktur *S-I Gap* terhadap PDB pada sektor bukan keuangan persentasenya relatif berfluktuatif. Pada tahun 2005 persentase sektor bukan keuangan sebesar 0,16 persen, hal ini berarti bahwa sektor bukan keuangan memiliki kemampuan untuk memperoleh hutang dari sektor lain guna membiayai investasi non finansialnya. Namun pada tahun 2006 hingga tahun 2010 persentase struktur ini kembali negatif yaitu antara minus 0,32 persen hingga minus 2,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, sektor ini tidak banyak melakukan ekspansi pada investasi fisik.

Grafik 4.4 S-I Gap Sektor-sektor Keuangan dan Bukan Keuangan Indonesia, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)



Keterangan:

1. Bank Sentral 2. Perbankan
3. Bukan Bank (Pegadaian, Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan)



Keterangan:

4. Rumah Tangga 5. Pemerintah 6. Perusahaan Pemerintah
7. Bisnis/swasta non finansial 8. Luar Negeri

Sektor Keuangan

Perkembangan struktur *S-I Gap* terhadap PDB pada sektor keuangan selama tahun 2005-2010 rasionya selalu positif, yaitu berkisar antara 0,25 persen yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2,43 pada tahun 2005. Meskipun selalu positif, namun selama tahun 2005-2010 cenderung menurun hingga mencapai sebesar 0,25 persen pada tahun 2010. Persentase yang positif pada sektor ini menunjukkan bahwa sektor ini masih mempunyai kelebihan (surplus) pada dana internalnya. Dana ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi sektor lainnya maupun untuk membiayai sendiri investasi finansialnya.

Sektor Luar Negeri

Struktur *S-I Gap* sektor luar negeri terhadap PDB selama periode 2005 hingga 2006 persentasenya selalu negatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengurangi kegiatan investasi non finansialnya serta mengindikasikan telah terjadinya *capital inflow*. Sebaliknya, pada tahun 2007 struktur pinjaman netonya terhadap PDB persentasenya positif, meskipun hanya sebesar 0,07 persen. Selanjutnya, pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar negatif 0,74 persen. Namun pada tahun 2009-2010 *S-I Gap* menurut sektor terhadap PDB menunjukkan arah yang positif sebesar 0,69 persen pada tahun 2009 dan sebesar 1,19 persen pada tahun 2010. Struktur yang positif pada *S-I Gap* menunjukkan bahwa sektor luar negeri telah bergairah untuk meningkatkan investasinya.

Hal lain yang menarik adalah fenomena mengalirnya arus modal masuk (*capital inflow*) jangka pendek yang cukup deras dari Luar Negeri ke pasar keuangan Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari keadaan stabilitas makroekonomi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang positif serta imbal hasil yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Keadaan ini tentunya menimbulkan persepsi positif bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4.3.3. Investasi Finansial

Gambaran Umum Beberapa Instrumen Finansial

Tabel 4.8 menggambarkan komposisi jenis-jenis investasi finansial berdasarkan instrumen finansial. Selama tahun 2009 investasi finansial mengalami ekspansi yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2008. Perubahan ini terkait dengan kondisi perekonomian global yang semakin kondusif serta pulihnya kepercayaan para investor eksternal terhadap pasar keuangan di Indonesia.

Investasi finansial yang tercipta pada tahun 2010 sebesar Rp3.321,17 triliun atau meningkat sebesar 1,42 persen jika dibandingkan dengan investasi finansial yang tercipta tahun 2009 sebesar Rp3.274,76 triliun. Peningkatan ini umumnya terjadi pada cadangan valas pemerintah, uang dan simpanan, modal saham, dan surat berharga pemerintah.

Pada kondisi tahun 2010 pada instrumen finansial yang berupa cadangan valas pemerintah memiliki kontribusi terhadap total investasi finansial sebesar 6,85 persen.

Uang dan simpanan memiliki kontribusi sebesar 12,92 persen, modal saham memberikan *share* sebesar 42,58 persen, dan surat berharga pemerintah sebesar 2,63 persen.

Tabel 4.8 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2010 (Triliun rupiah)

Instrumen Finansial	Nilai	%
01. Cadangan Valas Pemerintah	227,48	6,85
02. Klaim dalam Valas Lainnya	(29,26)	(0,88)
03. Uang dan Simpanan	428,96	12,92
04. Surat Berharga Jangka Pendek	20,94	0,63
05. Kredit	477,42	14,38
06. Modal Saham dan Penyertaan	1.414,00	42,58
a. Modal Saham	1.227,72	36,97
b. Penyertaan	186,28	5,61
07. Surat Berharga Jangka Panjang	114,45	3,45
a. Surat Berharga Pemerintah	87,44	2,63
b. Surat Berharga Lainnya	27,02	0,81
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	49,42	1,49
09. Kredit Dagang	38,71	1,17
10. Rekening Antar Bank	211,81	6,38
11. Rupa-rupa	367,22	11,06
Jumlah	3.321,15	100,00

Tabel 4.9 menggambarkan tentang perubahan penempatan SBI pada masing-masing sektor selama tahun 2010. Luar Negeri merupakan sektor yang paling dominan dalam menempatkan dananya di instrumen ini yaitu sebesar Rp10,74 triliun. Sedangkan sektor perbankan justru mengurangi investasinya secara besar-besaran pada SBI (*net selling*), yaitu sebesar Rp68,42 triliun. Sektor lain yang juga melakukan *net selling* pada instrumen ini adalah Bank Sentral, Rumah Tangga, dan Bisnis non finansial, walupun perubahannya tidak signifikan.

Tabel 4.9 Komposisi Penempatan SBI Oleh Masing-Masing Sektor, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	Perubahan
1. Bank Sentral	(0,39)
2. Perbankan	(68,42)
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,98
4. Rumah Tangga	(0,15)
5. Pemerintahan Umum	0,00
6. Perusahaan Pemerintah	0,00
7. Perusahaan Swasta Non Finansial	(0,90)
8. Luar Negeri	10,74
Jumlah	(57,1)

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa beberapa instrumen finansial jangka pendek telah menjadi sasaran investasi bagi para investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Instrumen yang paling menarik minat bagi investor asing adalah uang dan simpanan dalam valas dan rupiah, saham, penyertaan, obligasi pemerintah, obligasi swasta, kredit dagang dan SBI. Secara total, investasi luar negeri di pasar keuangan domestik memberikan kontribusi sebesar 9,57 persen dari total seluruh investasi yang tercipta pada tahun 2010. Secara nominal, investasi luar negeri yang tercipta pada tahun 2010 sebesar Rp287,13 triliun sedangkan total investasi secara keseluruhan sebesar Rp3.001,33 triliun.

Uang dan simpanan dalam valas yang disalurkan dari luar negeri, persentasenya mencapai 121,12 persen dari seluruh total uang dan simpanan dalam valas. Di pasar keuangan, dominasi modal asing terhadap total surat berharga pemerintah (SBN), penyertaan, dan obligasi swasta, serta SBI juga sangat signifikan yaitu masing-masing sebesar 94,76 persen untuk penyertaan, 123,92 persen (SBN atau obligasi pemerintah), dan 27,24 persen (obligasi swasta).

**Tabel 4.10 Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik
Menurut Jenis Investasi, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)**

KATEGORI TRANSAKSI	NILAI	TOTAL INVESTASI	% THD TOTAL INVESTASI
01. Klaim Dalam Valas Lainnya	(9,00)	(29,26)	30,75
02. Uang dan Simpanan	21,69	428,96	5,06
a. Dalam Valas	10,38	8,57	121,12
b. Dalam Rupiah	11,31	419,57	2,70
03. Surat Berharga Jangka Pendek	(5,68)	20,94	(27,13)
04. Kredit	29,82	477,43	6,25
05. Saham dan Penyertaan	398,37	1.414,00	28,17
06. Penyertaan	176,52	186,28	94,76
07. Obligasi Pemerintah	108,36	87,44	123,93
08. Obligasi Swasta	7,36	27,02	27,22
09. Kredit dagang	1,47	38,71	3,80
10. Sertifikat bank Indonesia	10,74	(57,14)	(18,80)
11. Rupa-Rupa	(275,98)	367,23	(75,15)
J U M L A H	287,13	3.389,74	8,47

4.4. TINJAUAN NAD SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), TAHUN 2010

Peran intermediasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB cukup strategis dan berpotensi besar dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Dengan pertimbangan tersebut maka dalam tulisan ini akan dianalisis tersendiri mengenai arus dana sektor LKBB selama tahun 2010. Sektor-sektor dalam LKBB sebenarnya jumlahnya cukup banyak, namun karena keterbatasan data, dalam bab ini hanya akan diuraikan terhadap 4 (empat) sektor LKBB saja. Keempat sektor dalam LKBB tersebut adalah : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Dana Pensiun, dan Perusahaan Pegadaian.

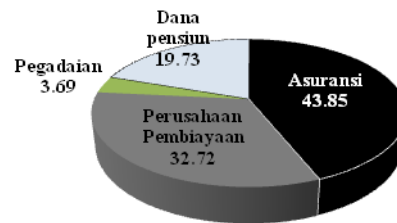
4.4.1. Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan *S-I Gap* LKBB 2010

Pada Tabel 15 (yang disajikan pada lampiran) terlihat bahwa selama tahun 2010, tabungan bruto yang tercipta oleh seluruh perusahaan dalam LKBB mencapai Rp22,57 triliun⁴ atau 1,08 persen dari total perekonomian. Pada saat yang sama investasi non

⁴ turun 44,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

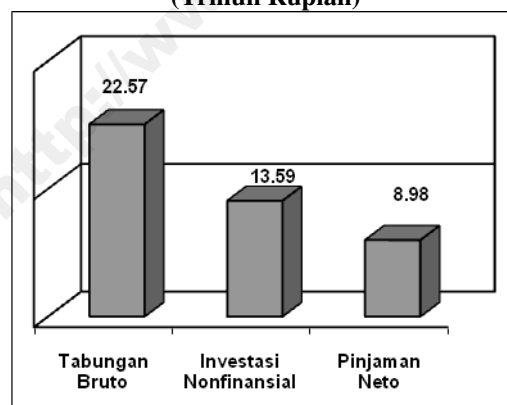
finansialnya juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar Rp13,59 triliun⁵, meskipun peranannya masih sebesar 0,65 persen terhadap perekonomian nasional. Tabungan bruto LKBB sebagian besar berasal dari sektor Perusahaan Asuransi yang porsinya mencapai 43,85 persen dari total tabungan bruto LKBB.

Grafik 4.5 Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-sektor LKBB, Tahun 2010 (Persen)



Peningkatan tabungan bruto dan investasi non finansial LKBB ini didukung oleh stabilitas makroekonomi yang semakin baik pasca krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 hingga pertengahan 2009. Penurunan suku bunga pinjaman yang lebih rendah juga turut mendorong peningkatan kedua komponen tersebut.

Grafik 4.6 Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)

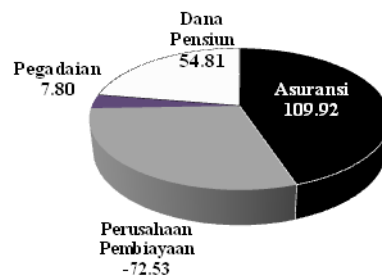


Pada tahun 2010 *S-I gap* sektor LKBB meningkat sebesar Rp8,98 triliun. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *S-I gap* yang tercipta ini turun sebesar 73,97 persen. Turunnya *S-I gap* tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba usahanya⁶.

⁵ meningkat 118,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

⁶ yang tercermin di tabungan bruto.

Grafik 4.7 Proporsi Pinjaman Neto LKBB menurut sektor, Tahun 2010 (Persen)



Jika diamati dari kinerja sektoralnya, *S-I gap* yang terjadi pada LKBB di tahun 2010 ini lebih banyak disebabkan oleh *S-I gap* yang terjadi pada sektor Perusahaan Asuransi sebesar Rp9,87 triliun (109,92 persen). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka semua sektor LKBB mengalami penurunan *S-I gap* (kecuali Perusahaan Pegadaian dan Perusahaan Dana Pensiun yang mengalami kenaikan *S-I gap* masing-masing sebesar 37,31 persen, dan 85,27 persen). Sektor Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan *S-I gap* tertinggi, sebesar 211,35 persen, sedangkan Perusahaan Asuransi sebesar 59,00 persen. Penurunan tersebut sejalan dengan melambatnya kinerja sektor LKBB dalam penciptaan nilai tambahnya. Pada tahun 2009, sektor tersebut mampu tumbuh 7,91 persen, sedangkan tahun 2010 tumbuh melambat sebesar 6,35 persen.

4.4.2. Investasi Finansial LKBB 2010

Sebagai bagian dari upaya ekspansi kegiatan ekonominya di samping meningkatkan investasi riil, LKBB juga melakukan investasi finansial. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial (91,67 persen), sedangkan sisanya dalam bentuk aset non finansial (8,33 persen).

Tabel 4.11 Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2010
(Triliun Rupiah)

Jenis Investasi Finansial	Penambahan	Pengurangan	neto
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cadangan Valas Pemerintah			
02. Klaim dalam Valas Lainnya		0,03	-0,03
03. Uang dan Simpanan	31,30		31,30
04. Surat Berharga Jangka Pendek	5,76		5,76
05. Kredit	49,67		49,67
06. Modal Saham dan Penyertaan	47,84		47,84
07. Surat Berharga Jk Pjg	22,09		22,09
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0,00		0,00
09. Kredit Dagang			0,00
10. Rekening Antar Bank	1,98		1,98
11. Rupa-rupa		9,08	-9,08
Jumlah	158,64	9,11	149,53

Selama tahun 2010, secara neto LKBB berhasil meningkatkan aset finansialnya sebesar Rp149,53 triliun, meskipun peningkatan tersebut turun 62,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari peningkatan aset finansial neto tersebut, sebesar Rp158,64 triliun merupakan penambahan aset finansial, sedangkan sebesar Rp9,11 triliun merupakan pengurangan aset. Aset finansial yang bertambah didominasi oleh kredit (Rp49,67 triliun), diikuti modal saham dan penyertaan (Rp47,84 triliun), uang dan simpanan (Rp31,30 triliun), surat berharga jangka panjang (Rp22,09 triliun), surat berharga jangka pendek (Rp5,76 triliun), dan rekening antar bank (Rp1,98 triliun). Sedangkan aset finansial yang berkurang berupa klaim dalam valas lainnya (Rp0,03 triliun) dan rupa-rupa (Rp9,08 triliun).

Dari segi pembiayaan, sektor-sektor LKBB menggunakan berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Sumber pembiayaan internal berasal dari *S-I gap*, sedangkan sumber eksternalnya berasal dari transaksi di pasar keuangan. Sumber pembiayaan eksternal merupakan kewajiban bagi LKBB. Selama tahun 2010, LKBB mampu mendapatkan sumber dana eksternal sebesar Rp154,15 triliun. Sebagian besar dari sumber dana tersebut berupa cadangan asuransi dan pensiun yang bertambah sebesar 49,42 triliun. Peningkatan yang terjadi pada cadangan asuransi dan pensiun tersebut disebabkan

oleh meningkatnya kewajiban tersebut di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Dana Pensiun masing-masing sebesar Rp44,23 triliun, dan Rp5,18 triliun.

**Tabel 4.12 Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2010
(Triliun Rupiah)**

Jenis Sumber Pembiayaan	Penambahan	Pengurangan	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Sumber Eksternal</u>	<u>154,15</u>	<u>13,60</u>	<u>140,55</u>
01. Cadangan Valas Pemerintah			0,00
02. Klaim dalam Valas Lainnya	2,82		2,82
03. Uang dan Simpanan			0,00
04. Surat Berharga Jangka Pendek	1,56		1,56
05. Kredit	39,56		39,56
06. Modal Saham dan Penyertaan	9,18		9,18
07. Surat Berharga Jk Pjg		13,60	-13,60
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	49,42		49,42
09. Kredit Dagang	0,00		0,00
10. Rekening Antar Bank			0,00
11. Rupa-rupa	51,60		51,60
<u>Sumber Internal</u>	<u>8,98</u>	<u>-</u>	<u>8,98</u>
12. <i>S-I Gap</i>	8,98		8,98
Jumlah	163,12	13,60	149,53

Selain menambah kewajiban finansial untuk memperoleh sumber dana, sektor-sektor pada LKBB pada tahun 2010 juga mengurangi kewajibannya berupa surat berharga jangka panjang sebesar Rp13,60 triliun. Dengan demikian, secara neto kewajiban sektor LKBB⁷ tetap bertambah sebesar Rp140,55 triliun. Kewajiban (neto) tersebut ditambah dengan sumber internal LKBB (*S-I gap*) yang sebesar Rp8,98 triliun, merupakan dana yang siap digunakan untuk pembiayaan investasi finansial yang dilakukan oleh sektor-sektor LKBB.

⁷ Juga merupakan sumber eksternal untuk investasi.

4.4.3 Gambaran Ringkas Investasi Sektor-Sektor LKBB Tahun 2010

Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam LKBB. Hal ini disebabkan total aset yang dihasilkan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 51,71 persen dari total aset LKBB. Selama tahun 2010 aset sektor Perusahaan Asuransi bertambah sebesar Rp84,35 triliun. Sebagian besar aset yang terjadi selama periode tersebut berupa aset finansial yang porsinya mencapai 99,97 persen dari total aset atau bertambah (neto) sebesar Rp84,33 triliun.

Tabel 4.13 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2010 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>0.03</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>9.90</u>
		Tabungan Bruto	9.90
<u>Investasi Finansial</u>	<u>84.33</u>		
01. Uang dan Simpanan	17.40	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>74.46</u>
02. Surat Berharga Jangka Pendek	0.02	01. Kredit	0.41
03. Kredit	-0.28	02. Modal Saham dan Penyertaan	2.55
04. Modal Saham dan Penyertaan	42.88	03. Surat Berharga Jangka Panjang	0.02
05. Surat Berharga Jangka Panjang	18.10	04. Cadangan Asuransi dan Pensiun	44.23
06. Rekening Antar Bank	-0.73	05. Rupa-rupa	27.24
07. Rupa-rupa	6.93		
Jumlah	84.35		84.35

Perubahan (neto) aset finansial yang mencapai Rp84,35 triliun, berasal dari penambahan aset finansial sebesar Rp85,34 triliun serta pengurangan aset finansial sebesar Rp1,01 triliun. Penambahan aset finansial sebagian besar berupa modal saham dan penyertaan sebesar Rp42,88 triliun, obligasi (surat berharga jangka panjang) sebesar Rp18,10 triliun, serta uang dan simpanan sebesar Rp17,40 triliun. Sedangkan pengurangan aset finansial terjadi karena adanya penurunan (divestasi) rekening antar bank berupa pelepasan surat berharga SBI.

Untuk membiayai investasinya (investasi fisik dan finansial), sektor ini menggunakan dana internal⁸ maupun eksternal⁹. Dana internal awalnya digunakan untuk membiayai investasi non finansialnya, selisihnya¹⁰ ditambah dengan dana eksternal akan digunakan untuk membiayai investasi finansialnya. Dana internal selama tahun 2010 meningkat sebesar Rp9,90 triliun, sedangkan dana eksternalnya meningkat sebesar Rp74,46 triliun. Sebagian besar dana eksternal berasal dari peningkatan cadangan asuransi¹¹ sebesar Rp44,23 triliun atau 59,41 persen dari total dana eksternalnya. Sumber pembiayaan eksternal lainnya berasal dari modal saham/penyertaan, kredit, surat berharga jangka panjang, dan rupa-rupa, masing-masing sebesar Rp2,55 triliun, Rp0,41 triliun, Rp0,02 triliun, dan Rp27,24 triliun.

Perusahaan Pembiayaan (PP)

Seiring dengan stabilitas makroekonomi yang terus membaik serta suku bunga pinjaman yang cenderung turun, penerimaan laba PP dari kegiatan usahanya juga semakin meningkat. Hal ini tercermin dari bertambahnya tabungan bruto sektor ini sebesar Rp7,38 triliun pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 2,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertambahan total aset sektor Perusahaan Pembiayaan selama tahun 2010 meningkat tajam dibandingkan tahun 2009 (lihat Grafik 4.8). Hal ini disebabkan terjadinya pertambahan yang cukup signifikan pada aset non finansial dan beberapa aset finansial, yaitu: kredit, uang dan simpanan, dan rekening antar bank (SBI). Instrumen-instrumen finansial tersebut mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp46,07 triliun (kredit), Rp12,51 triliun (uang dan simpanan), dan Rp2,96 triliun (SBI). Penambahan tersebut jauh lebih besar dibandingkan penambahan aset finansial lainnya, seperti: surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, serta modal saham dan penyertaan. Selain meningkatkan investasinya pada beberapa aset finansial, sektor ini juga mengurangi aset finansialnya, yaitu berupa klaim dalam valas lainnya dan rupa-rupa, masing-masing sebesar Rp0,03 triliun dan Rp20,76 triliun.

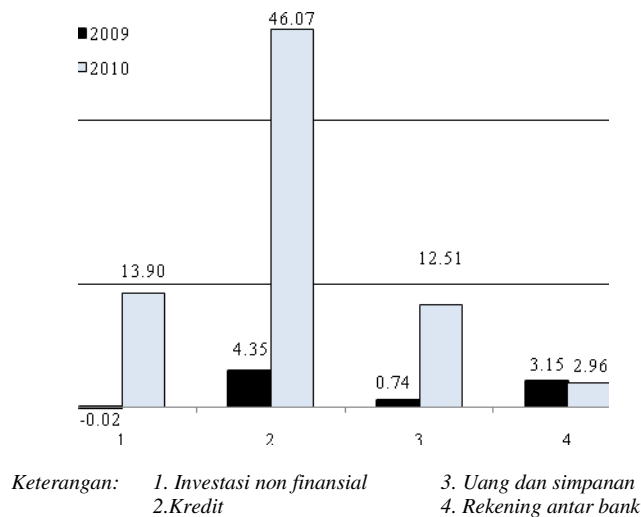
⁸ Berupa tabungan bruto

⁹ berupa kewajiban finansial

¹⁰ yang juga diistilahkan *S-I gap*

¹¹ berupa hutang premi dari Perusahaan dan Rumah Tangga

Grafik 4.8 Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2009 dan 2010 (Triliun Rupiah)



Terkait pembiayaan investasi, sektor Perusahaan Pembiayaan sebagai institusi intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yang spesifik seperti halnya LKBB lain. Sehingga untuk mendukung kegiatan investasinya, sektor ini sangat tergantung pada perolehan tabungan bruto serta aliran dana eksternal terutama dalam bentuk kredit perbankan. Bila dilihat dari struktur sumber pendanaannya, selama tahun 2010 sumber dana utama sektor ini berasal dari tabungan bruto, kredit, modal saham dan penyertaan, klaim dalam valas lainnya, surat berharga jangka pendek, dan rupa-rupa.

Seperti terlihat pada Tabel 4.14, sumber dana utama Perusahaan Pembiayaan pada tahun 2010 berasal dari kredit yang bertambah sebesar Rp34,81 triliun. Kredit bank dalam rupiah bertambah sebesar Rp17,03 triliun, begitu pula kredit dalam valas meningkat Rp17,62 triliun. Selama tahun 2010, sektor Perusahaan Pembiayaan juga mengurangi kewajiban finansialnya. Hal ini tercermin dari adanya penurunan kewajiban berupa surat berharga jangka panjang yang mencapai Rp13,29 triliun. Meski demikian, secara neto kewajiban Perusahaan Pembiayaan masih bertambah sebesar Rp49,47 triliun.

**Tabel 4.14 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2010
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>13,90</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>7,38</u>
		Tabungan Bruto	7,38
<u>Investasi Finansial</u>	<u>42,95</u>		
01. Klaim dalam Valas Lainnya	-0,03	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>49,47</u>
02. Uang dan Simpanan	12,51	01. Klaim dalam Valas Lainnya	2,82
03. Surat Berharga Jangka Pendek	1,49	02. Surat Berharga Jangka Pendek	1,56
04. Kredit	46,07	03. Kredit	34,81
05. Modal Saham dan Penyertaan	0,09	04. Modal Saham dan Penyertaan	6,63
06. Surat Berharga Jangka Panjang	0,63	05. Surat Berharga Jangka Panjang	-13,29
07. Rekening Antar Bank	2,96	06. Rupa-rupa	16,93
08. Rupa-rupa	-20,76		
Jumlah	56,85		56,85

Perusahaan Dana Pensiun

Peranan sektor Perusahaan Dana Pensiun dalam kapasitasnya sebagai institusi intermediasi non bank hingga saat ini masih belum menunjukkan potensinya. Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah Perusahaan Dana Pensiun di Indonesia yang masih aktif tercatat sebanyak 276 perusahaan, terdiri dari 251 perusahaan DPPK dan 25 perusahaan DPLK. Sedangkan jumlah pekerja yang tercatat sebagai peserta dana pensiun baru sebesar 2,68 juta. Menurut data BPS per Agustus 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja untuk kelompok wiraswasta (*self employed*), berusaha dengan pekerja tetap (*employer with permanent workers*), dan buruh/karyawan (*employee*) ada sebanyak 52,5 juta orang. Data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat dimungkinkan untuk sektor ini menjangkau peserta yang berasal dari kalangan pekerja lainnya.

Dari seluruh jumlah Perusahaan Dana Pensiun tersebut, nilai kekayaan (aset) yang berhasil dihimpun per akhir tahun 2010 mencapai Rp118,61 triliun atau 1,85 persen

terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2010¹². Aset tersebut naik sebesar Rp17,41 triliun dibandingkan tahun 2009, dimana sebesar Rp17,88 triliun berupa kenaikan dalam bentuk aset finansial.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global pasca krisis tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009, perusahaan dana pensiun melakukan ekspansi di tahun 2010. Hal ini terlihat, dari meningkatnya pertambahan aset tahun 2010 sebesar 11,43 persen dibandingkan tahun 2009. Kenaikan pertambahan aset tersebut lebih disebabkan kenaikan pertambahan aset finansial sebesar 17,50 persen. Kenaikan tertinggi pertambahan aset finansial adalah berupa deposito berjangka (149,98 persen) dan uang dan simpanan (69,32 persen).

**Tabel 4.15 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Dana Pensiun, Tahun 2010
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
Investasi Nonfinansial	-0,47	Sumber Internal	4,45
		Tabungan Bruto	4,45
Investasi Finansial	17,88		
01. Uang dan Simpanan	1,28	Sumber Eksternal	12,96
02. Surat Berharga Jangka Pendek	4,24	01. Kredit	0,50
03. Kredit	0,00	02. Surat Berharga Jangka Panjang	-0,06
04. Modal Saham dan Penyertaan	4,87	03. Cadangan Asuransi dan Pensiun	5,18
05. Surat Berharga Jangka Panjang	3,36	04. Rupa-rupa	7,33
06. Rekening Antar Bank	-0,26		
07. Rupa-rupa	4,38		
Jumlah	17,41		17,41

Secara umum, investasi finansial selama tahun 2010 di sektor ini tersebar ke dalam 7 jenis instrumen (lihat Tabel 4.15). Sedangkan jenis investasi yang menjadi pilihan utama dari pengurus dana pensiun dalam menempatkan dana kelolaannya adalah

¹² atas dasar harga berlaku.

saham/penyertaan (27,23 persen), surat berharga negara dan obligasi swasta (23,27 persen)¹³, deposito berjangka (18,78 persen), dan rupa-rupa (24,52 persen).

Dari segi pembiayaan investasi, sumber pembiayaan terbesar selama tahun 2010 berasal dari hutang iuran anggota Perusahaan Dana Pensiun (cadangan pensiun) yang meningkat sebesar Rp5,18 triliun. Sumber pembiayaan yang berasal dari kredit¹⁴ dan rupa-rupa juga meningkat, masing-masing sebesar Rp0,50 triliun dan Rp7,33 triliun. Sedangkan sumber pembiayaan lainnya yaitu surat berharga jangka panjang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,06 triliun.

Pegadaian

Gambaran mengenai sektor pegadaian dalam tulisan ini mengacu kepada kinerja dari Perum Pegadaian¹⁵. Walaupun total aset perusahaan ini paling kecil di antara LKBB lainnya (hanya sebesar 2,76 persen aset LKBB), namun selama tahun 2010 perusahaan ini telah menunjukkan kinerja yang cukup meningkat. Hal ini terlihat dari besaran kredit yang disalurkan yang mencapai peningkatan Rp3,89 triliun serta jumlah nasabah sebanyak 32,10 juta nasabah selama tahun 2010.

**Tabel 4.16 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2010
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>0,13</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>0,83</u>
		Tabungan Bruto	0,83
<u>Investasi Finansial</u>	<u>4,36</u>		
01. Uang dan Simpanan	0,11	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>3,66</u>
02. Kredit	3,89	01. Kredit	3,67
03. Rupa-rupa	0,37	02. Surat Berharga Jangka Panjang	-0,27
		03. Rupa-rupa	0,26
Jumlah	4,50		4,50

¹³ Proporsi kenaikan jenis instrumen finansial terhadap total aset (aset non finansial dan aset finansial)

¹⁴ Berupa kredit bank dalam rupiah dan valas

¹⁵ Sebagai institusi yang bergerak dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

Sejalan dengan meningkatnya aktiva maka beberapa sumber eksternal (kewajiban) perusahaan ini juga mengalami peningkatan. Selama tahun 2010, perusahaan ini telah mendapatkan dana dari perbankan berupa kredit bank yang meningkat sebesar Rp3,67 triliun. Sedangkan sumber dana lainnya berupa obligasi berkurang sebesar Rp0,27 triliun. Di sisi lain, sumber dana internal (tabungan bruto) yang digunakan sebagai sumber pembiayaan hanya meningkat Rp0,83 triliun. Hal ini menunjukkan masih tingginya kepercayaan dari dunia perbankan dan investor pasar modal terhadap kinerja perusahaan ini.

Informasi sumber dana yang berasal dari saham tidak relevan karena sesuai dengan status hukum perusahaan yang berbentuk Perusahaan Umum. Sehingga, modal perusahaan ini bukan berbentuk saham tetapi berasal dari penyertaan modal Pemerintah. Ini berarti, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang 100 persen saham Perum Pegadaian

4.5. PERCEPATAN UANG BEREDAR (*VELOCITY OF MONEY*) DAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL DEEPENING*)

4.5.1. Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*)

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Peredaran uang disebabkan adanya transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perekonomian. Jika *V* rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika *V* tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi.

Sebagai contoh sederhana, pada suatu periode, A menjual barang dagangannya ke B sebesar Rp50 ribu, maka *V* yang terjadi adalah 1. Selanjutnya jika A menggunakan uang Rp50 ribu tersebut untuk membayar jasa perbaikan barang misalnya, maka terjadi perpindahan uang (*V*) satu kali lagi. Walaupun secara nominal uangnya masih yang sama yaitu Rp50 ribu namun secara agregat jumlah uang yang beredar adalah Rp100 ribu r, sehingga perpindahan uang yang terjadi ada sebanyak 2 kali atau:

$$V = \frac{100}{50} = 2.$$

Velocity of money dapat juga dipakai sebagai ukuran dalam menentukan inflasi. Di samping itu fluktuasi yang terjadi dalam *velocity of money* biasanya selalu diikuti dengan fluktuasi pada suku bunga (*interest rate*).

Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan rumus:

$$V = \frac{PDB}{M_1}$$

Di mana : V = *Velocity of Money*

 PDB = Produk Domestik Bruto

 M₁ = Uang beredar sempit

4.5.2. Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

Pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik eksese likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu:

- (i) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan.
- (ii) Dari sisi investor, pasar keuangan yang dalam memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya.
- (iii) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor

menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid.

Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB (King dan Levine, 1993).

4.5.3. Uraian Ringkas *Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia Tahun 2005-2010

Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan *velocity of money* (V) dan *financial deepening* (FD) selama periode 2005-2010. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai agregat moneter lainnya, yaitu perkembangan uang beredar.

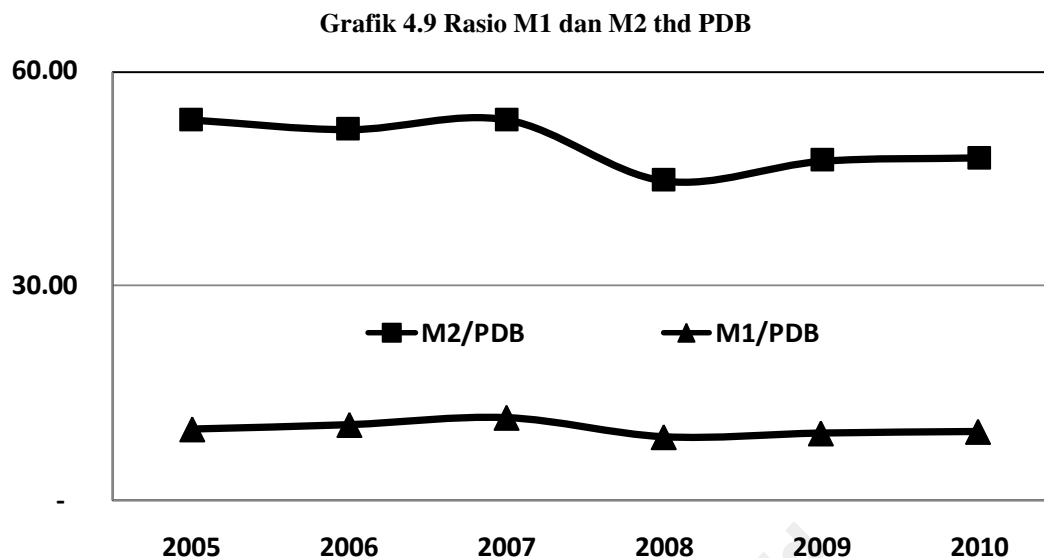
Tabel 4.17 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto
Tahun 2005-2010

Tahun	Uang Beredar (Triliun Rp) 1)			M2	PDB 2) (Triliun Rp)	Velocity (PDB/M1)	Rasio (%)	
	M1	Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham				M1/PDB	M2/PDB
2005	271,14	929,34	2,28	1.202,76	2.774,28	10,23	9,77	45,03
2006	347,01	1.032,87	2,62	1.382,49	3.339,22	9,62	10,39	43,35
2007	450,06	1.196,12	3,49	1.649,66	3.950,89	8,78	11,39	41,40
2008	456,79	1.435,77	3,28	1.895,84	4.948,69	10,83	9,23	41,75
2009	515,82	1.622,06	3,50	2.141,38	5.603,87	10,86	9,20	38,29
2010	605,41	1.856,72	9,08	2.471,21	6.422,92	10,61	9,43	38,15

Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia
2) Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta hubungannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2005-2010 tercermin pada tabel 4.17. Posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi dari uang kuasi. Selama periode 2005-2010 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,18 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 24,57 persen, dan sisanya sebesar 0,25 persen berasal dari surat berharga selain saham selain saham. Pertumbuhan M1 meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan uang kuasi. Selama periode 2005 – 2010 M1 tumbuh rata-rata sebesar 16,63 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan uang kuasi yang rata-

rata tumbuh sebesar 15,46 persen. Hal ini mencerminkan bahwa M1¹⁶ lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi¹⁷.



Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*). Kondisi pendalaman pasar uang Indonesia selama periode 2005 – 2010 dapat dilihat dari Grafik 4.9 Untuk kasus Indonesia, upaya pendalaman sektor Keuangan sedang dilakukan, karena sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor Keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Kedalaman sektor Keuangan terus menunjukkan penurunan sejak krisis 1997/1998. Krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berpengaruh pada sektor Keuangan domestik terlihat semakin menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2008, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2005 – 2010 yaitu sebesar 36,04 persen. Tetapi rasio tersebut kemudian naik sedikit menjadi 38,47 persen di tahun 2010.

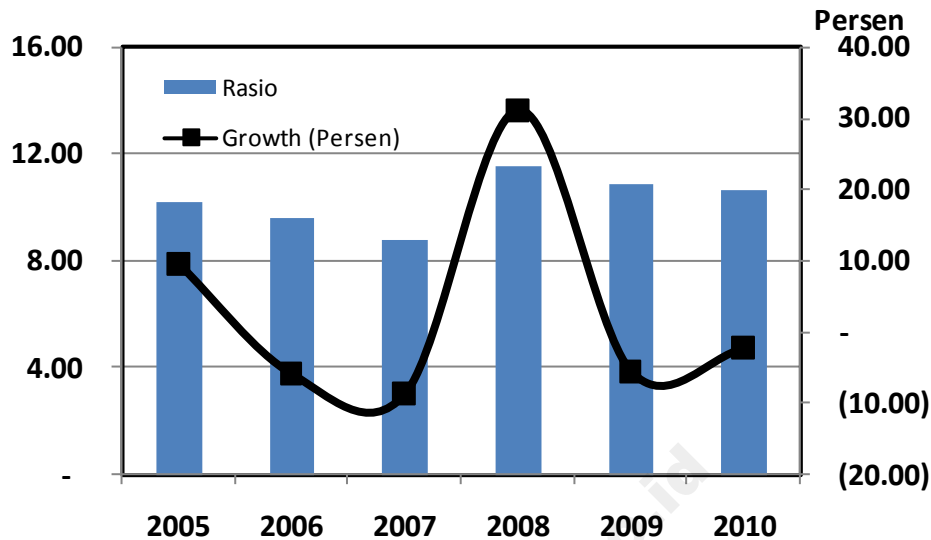
Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor Keuangan Indonesia, yakni (i) rendahnya intermediasi yang dilakukan oleh institusi-institusi di sektor Keuangan, (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi, dan (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Indonesia. Namun dangkalnya sektor Keuangan memungkinkan Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis keuangan global. Sektor Keuangan Indonesia yang memiliki eksposur terbatas pada *structured*

¹⁶ yang terdiri dari uang kartal di luar bank umum dan BPR serta simpanan giro rupiah

¹⁷ yang terdiri dari simpanan berjangka, tabungan, dan simpanan giro valas

products, termasuk *subprime mortgage*, menjadikan sistem keuangan Indonesia sedikit terpengaruh dampak krisis keuangan global.

Grafik 4.10 Velocity of Money



Disamping *financial deepening*, masalah percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*) juga merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk melihat gambaran tentang stabilitas keuangan moneter. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2005 – 2010 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 8,78 – 10,86. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2005 – 2010 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan PDB atas harga berlaku cenderung mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan M1 cenderung mengalami kenaikan sebelum terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.mps.go.id>

Lampiran 1

**Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia**

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

I. SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL SECTOR*)

1.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

1.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah.

1.2.1 Bank Pencipta Uang Giral (*Deposit Money Banks*)

Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. BPUG terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

1.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

1.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dan Kartu Kredit (*Credit Card*). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*non depositories institution*) sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (*lessor*) kepada para penyewa guna usaha (*lease*) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "*finance lease*" maupun "*operating lease*" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai *issuer*, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

1.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang

kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

1.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*Loss Insurance Business*)

Usaha Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Konsultan Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (*Loss Adjuster Business*)

Usaha Penilai Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuaria (*Actuarial Consultant Business*)

Usaha Konsultan Aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (*Insurance Agency Business*)

Usaha Agen Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan di bidang pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggungjawab.

1.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES

- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN
- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau *Initial Public Offering* (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, *Underwriter*, *Adjuster* dan Penjamin Emisi.

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (*NONFINANCIAL SECTORS*)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institusi yang memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan

penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Perusahaan Swasta (Bisnis) dan Rumah Tangga.

2.1 Pemerintah (*Government*)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

2.2 Perusahaan Pemerintah (*Government Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Termasuk juga di sini Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dan tatacara pembinaan dan pengawasannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PESERO). Pertamina yang badan hukumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971 termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank. Pada umumnya kegiatan utama BUMN non finansial membutuhkan modal (investasi) yang berskala besar.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

2.2.3 Badan Urusan Logistik (*National Food Authority*)

Merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969. Tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menghimpun, menyalurkan, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat berupa beras, jagung, terigu/gandum, gula pasir, kacang kedelai dan sebagainya. BULOG tidak digolongkan sebagai bagian dari kegiatan BUMN karena bentuk, sifat dan tujuannya berbeda. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai usahanya tidak berasal dari anggaran belanja negara, tetapi berasal dari

pinjaman bank-bank dalam negeri (BI, BBD, BRI), pihak lain dan kekayaan/tabungan yang berasal dari usahanya.

2.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Perusahaan Swasta Non Finansial.

2.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (non-KUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Non rural Cooperative*)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

2.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Non finansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2.4 Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga⁸ dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

III. SEKTOR LUAR NEGERI (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*).

⁸ Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang bersifat tetap maupun yang sementara (dalam batas waktu tertentu).

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 2

Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan Barang Modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan Neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan disini meliputi: pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

0200 Investasi Non finansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,

bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin peralatan. Pengeluaran barang modal dan bangunan untuk keperluan militer tidak tercakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

0220 Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Bank Sentral merupakan bagian dari kategori transaksi Cadangan Valuta Asing Pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200

Pinjaman Neto merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Non Finansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau *Saving Investment Gap (S-I Gap)*.

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya Selisih Statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

0500 Investasi Finansial Neto = 0600 - 0700

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan Valuta Asing (Valas) Pemerintah terdiri dari Emas Moneter, *Special Drawing Rights*, Posisi Cadangan di IMF, Deposito, dan Surat Berharga Dalam Valuta Asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan Valas Pemerintah adalah Aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor Luar Negeri. Dalam penghitungan Pendapatan Nasional, Emas Moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas Moneter

Kategori ini mencakup emas yang dimiliki atau disimpan oleh Bank Indonesia. Emas moneter mencakup juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 *Special Drawing Rights (SDR)*

SDR merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (*IMF*) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan oleh Bank Indonesia, Giro dan Deposito Berjangka di bank-bank Luar Negeri, Wesel Ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya

Kategori ini mencakup seluruh klaim Luar Negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Kategori ini mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi, seperti Cadangan Valas Pemerintah, Deposito Dalam Valas, Pinjaman Dalam Valas, Tagihan Jangka Pendek dan Tagihan Jangka Panjang Dalam Valas, serta Obligasi.

1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)

Uang dan Simpanan terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, Deposito dan Giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta Deposito dan simpanan lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di Luar Negeri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Uang Kartal dan Uang Logam yang beredar, Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Tabungan Giro Pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang

Kategori ini mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro

Kategori ini merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 Tabungan

Kategori ini merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Kategori ini merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 Tabungan Lainnya

Kategori ini mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG dan Bank Asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka.

1021 Uang Kertas dan Logam

Kategori ini mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Kategori ini merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi masuk kategori Klaim Antar Bank (2000).

1023 Tabungan

Tabungan merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi

Tabungan Giro Pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan Koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan

oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dengan surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Kategori ini mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank dalam kategori ini biasanya digunakan untuk tujuan bisnis. Kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada Kredit Konsumsi; termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini hanya mencakup pinjaman Bank dalam rupiah, sedangkan pinjaman Bank dalam valas dimasukkan dalam kategori Pinjaman Dalam Valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka panjang atau menengah yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang-barang tahan lama lainnya untuk keperluan konsumsi. Dalam kategori ini juga termasuk Hutang Hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal.

1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan non finansial (Pemerintah dan Swasta) termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja

Lihat definisi 1211.

1222 Kredit Investasi

Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari Perusahaan Asuransi Jiwa, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Kategori ini mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup Hutang Jangka Panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas. Berbeda dengan hutang, Obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang Obligasi tidak selalu dijamin oleh harta riilnya.

1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang Pemerintah yang dijual di dalam maupun luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka panjang

dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori Surat Berharga Jangka Panjang Lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan oleh selain pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan untuk kredit kepemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh Yayasan, Perusahaan Swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Kategori ini mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi non jiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi Preusan Asuransi Jiwa dan Preusan Dana Pensiun, transaksi ini merupakan hutang Perusahaan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi Preusan Asuransi Non Jiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi non jiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa yang akan datang. Cadangan teknis pada Preusan Asuransi Non Jiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Kategori ini mencakup mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis, berupa hutang-piutang antar penyuplai dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit Dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit Dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka Kredit Dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 Rekening Antar Bank

Rekening Antar Bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk rekening antar kantor, antar cabang dan kantor

pusat, atau antar cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivasinya) dan dimasukkan dalam kategori Rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 3

Matrik NAD Indonesia

Menurut Kategori Transaksi dan Sektor

2005 - 2010

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

TABEL 1. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 1. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		17,138		45,511		10,801		191,768		108,813
0200	Investasi Nonfinansial	556		4,314		1,036		33,425		90,213	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16,582		41,197		9,764		158,343		18,600	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,582		41,197		9,764		158,343		18,600	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	30,845		196,786		53,834		257,427		55,067	
0700	Jumlah Sumber Finansial		14,262		155,589		44,070		99,084		36,467
0800	Cadangan Valas Pemerintah	4,090									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(997)		691	(438)	(13)	53		63	97	(69)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(1,220)	19,329	50,122	170,954	6,826		120,784		32,275	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1,220)	3,206	46,980	54,810	1,210		19,859		3,443	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		16,123	3,142	116,144	5,616		75,125		28,832	
1021	Uang Kertas dan Logam		17,975	3,003		749		5,989		749	
1022	Giro		(1,895)	(0)	22,950	(672)		(684)		22,395	
1023	Tabungan		43		(13,892)	227		(15,265)		388	
1024	Deposito Berjangka				107,041	5,295		85,059		4,623	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			139	45	16		26		678	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							25,800			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			5,116	(211)	422	418	178		(8)	
1200	Kredit (Jumlah)	(13,715)	(4,491)	144,974	5,148	1,672	15,127	68	85,828	(689)	(31,712)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(13,716)		134,594			4,992		86,840		(12,734)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				2,929	1,753	1,549	68	(835)	(385)	
1230	Kredit dalam Valas	2	(4,491)	10,380	2,219	(80)	8,586		(176)	(304)	(18,977)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	(79)	(65)	3,806	3,633	1,132	50,211		(7,934)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	20,322	7,139	(1,107)	790	17,760	3,900	13,200		7,213	13,598
1410	Surat Berharga Pemerintah	20,322	8,582	(806)		11,043		(1,850)		8,582	13,598
1420	Surat Berharga Lainnya		(1,443)	(301)	790	6,717	3,900	15,050		(1,369)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					1,383	17,329	16,106			
1800	Kredit Dagang					13,493	8,854	6,477	10,197		
2000	Rekening Antar Bank	(722)	11,536	4,839	3,658	4,149	(24)	4,237			
9000	Rupa-rupa	23,086	(19,172)	(7,784)	(28,119)	4,509	(2,720)	46,167	2,995	24,113	54,649
	TOTAL	31,400	31,400	201,100	201,100	54,871	54,871	290,852	290,852	145,280	145,280

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2005 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2005 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3,833		432,804		(71,942)		738,726	GROSS SAVING	0100
70,456		538,726				738,726		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(66,623)		(105,922)		(71,942)		(0)		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(66,623)		(105,922)		(71,942)		(1)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
73,375		146,802		14,409		828,545		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	139,998		252,724		86,351		828,545	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					4,090	4,090	4,090	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		10,188	16,386	14,861	8,831	24,827	24,827	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
15,646		41,914	25,800	3,679	53,941	270,025	270,025	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
8,586		30,144		2,817	53,802	111,818	111,818	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
7,060		11,770		862	139	132,407	132,407	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,497		5,989				17,975	17,975	CURRENCY AND COIN	1021
(741)		(918)		1,676		21,055	21,055	DEMAND DEPOSITS	1022
(139)		838		102		(13,849)	(13,849)	SAVING DEPOSITS	1023
6,558		5,757		(251)		107,041	107,041	TIME DEPOSITS	1024
(115)		103		(664)	139	184	184	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
			25,800			25,800	25,800	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1,255	(5)	2,142	11,010	8,438	6,330	17,543	17,543	SHORT TERM SECURITIES	1100
27	3,916	(109)	32,643	(24,494)	1,275	107,734	107,734	CREDIT	1200
	2,637		38,845		299	120,878	120,878	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
27	58	(1,209)	(732)	2,716		2,969	2,969	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	1,221	1,100	(5,470)	(27,210)	975	(16,114)	(16,114)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
19,221	44,239	56,234	113,259	41,236	179	162,536	162,536	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1,715	3,637	(15,258)	46,558	33,701	1,924	77,546	77,546	LONG TERM SECURITIES	1400
(192)		(35,265)		20,345		22,180	22,180	GOVERNMENT BONDS	1410
1,907	3,637	20,007	46,558	13,355	1,924	55,366	55,366	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	590	430				17,919	17,919	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
7,782	21,183	12,483	1,392	1,392		41,627	41,627	TRADE CREDITS	1800
		(4,201)	24	6,892		15,195	15,195	INTERBANK CLAIMS	2000
27,729	66,438	42,979	5,652	(71,295)	9,781	89,504	89,504	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
143,831	143,831	685,528	685,528	14,409	14,409	1,567,271	1,567,271	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 2. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 2. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/ FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		17,256		27,613		8,815		180,262		181,082
0200	Investasi Nonfinansial	243		2,891		1,567		31,417		113,721	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	17,013		24,722		7,249		148,845		67,361	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0							
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	17,013		24,722		7,249		148,845		67,361	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	126,964		229,329		30,887		237,046		98,784	
0700	Jumlah Sumber Finansial		109,951		204,607		23,638		88,201		31,423
0800	Cadangan Valas Pemerintah	29,423									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(729)		(6,295)	(5,711)	(25)	98		(70)	(184)	64
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	13,228	(76,335)	(14,690)	161,175	12,470		84,189		2,425	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	13,228	(8,458)	(21,812)	(4,746)	(730)		(5,526)		(11,033)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(67,876)	7,122	165,921	13,200		80,522		13,458	
1021	Uang Kertas dan Logam		33,703	7,031		1,334		10,669		1,334	
1022	Giro		(101,324)	(1)	57,241	1,016		9,362		1,419	
1023	Tabungan		(256)		52,904	372		43,461		1,508	
1024	Deposito Berjangka				55,261	10,522		17,021		8,931	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			92	515	(43)		9		266	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							9,193			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			2,127	6,282	35	(409)	126			(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(156)	(5,834)	99,969	(608)	(123)	6,636	(57)	65,197	506	(67,241)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(154)		75,599			5,441		64,781		898
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(2,550)	(123)	1,321	(57)	(1,547)	321	
1230	Kredit dalam Valas	(2)	(5,834)	24,370	1,942		(126)	(0)	1,963	185	(68,139)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	44	(117)	(106)	8,694	(136)	3,643	34,824	(200)	5,680	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	11,810	13,626	(9,721)	1,828	4,689	(8)	1		15,917	32,284
1410	Surat Berharga Pemerintah	11,810	14,349	(11,505)		3,567				14,349	32,284
1420	Surat Berharga Lainnya		(724)	1,784	1,828	1,122	(8)	1		1,568	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					4,363	20,976	16,813			
1800	Kredit Dagang					29,784	(5,904)	19,259	21,787		
2000	Rekening Antar Bank	167	142,713	156,564	22,045	7,672	13	51			
9000	Rupa-rupa	73,178	35,898	1,481	10,902	(27,841)	(1,406)	81,839	1,487	74,440	66,316
	TOTAL	127,207	127,207	232,220	232,220	32,454	32,454	268,463	268,463	212,505	212,505

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2006 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2006 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3,708		467,893		(38,460)		848,168	GROSS SAVING	0100
78,006		620,324				848,168		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(74,298)		(152,431)		(38,460)				NET LENDING/BORROWING	0300
								STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(74,298)		(152,431)		(38,460)				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
12,952		323,518		44,642		1,104,121		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	87,250		475,949		83,101		1,104,121	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					29,423	29,423	29,423	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		(51,331)	(58,753)	(23,089)	(17,280)	(81,653)	(81,653)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
11,642		53,085	9,193	(76,257)	(7,943)	86,091	86,091	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,683		(1,514)		466	(8,034)	(21,238)	(21,238)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
5,959		54,599		(76,724)	91	98,136	98,136	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,667		10,669				33,703	33,703	CURRENCY AND COIN	1021
155		20,647		(76,682)	(1)	(44,083)	(44,083)	DEMAND DEPOSITS	1022
1,148		5,643		517		52,648	52,648	SAVING DEPOSITS	1023
2,012		17,327		(551)		55,261	55,261	TIME DEPOSITS	1024
(24)		314		(7)	92	607	607	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			9,193			9,193	9,193	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
49	(275)	(3,110)	(1,205)	2,205	(2,962)	1,431	1,431	SHORT TERM SECURITIES	1100
(59)	10,564	1,441	(94,598)	(185,876)	1,531	(84,355)	(84,353)	CREDIT	1200
	2,876		943		506	75,445	75,445	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(59)	(30)	456	256	(3,091)		(2,553)	(2,550)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	7,718	985	(95,797)	(182,786)	1,026	(157,248)	(157,248)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
7,670	65,774	464,912	519,376	79,044	(5,240)	591,932	591,932	STOCK AND PARTICIPATION	1300
583	40	11,946	16,275	25,991	(2,827)	61,217	61,217	LONG TERM SECURITIES	1400
(472)		17,638		11,246		46,633	46,633	GOVERNMENT BONDS	1410
1,055	40	(5,691)	16,275	14,745	(2,827)	14,584	14,584	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	600	400				21,576	21,576	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
5,762	8,077	58,352	59,344	2,331	32,183	115,488	115,488	TRADE CREDITS	1800
		(2,978)		3,297		164,772	164,772	INTERBANK CLAIMS	2000
(12,694)	2,469	(209,201)	26,316	216,997	56,215	198,200	198,197	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
90,958	90,958	943,842	943,842	44,642	44,642	1,952,289	1,952,289	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 3. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		(15,432)		24,690		19,386		241,342		168,661
0200	Investasi Nonfinansial	283		2,876		199		161,772		133,690	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(15,715)		21,814		19,187		79,571		34,972	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0						0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(15,715)		21,814		19,187				34,971	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	194,331		298,047		95,082		484,081		(818)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		210,046		276,233		75,895		404,510		(35,789)
0800	Cadangan Valas Pemerintah	157,378									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	121		3,162	637	0	149		108		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(4,543)	43,289	(9,249)	232,504	4,766		126,026		(8,408)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(4,543)	(4,626)	(20,110)	35,276	2,475		3,844		(4,788)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		47,914	10,861	197,229	2,291		122,182		(3,620)	
1021	Uang Kertas dan Logam		42,213	9,900		1,616		12,925		1,616	
1022	Giro		5,698		59,407	2,694		8,679		(7,211)	
1023	Tabungan		3		102,057	(393)		104,291		(773)	
1024	Deposito Berjangka				33,079	(1,625)		(3,892)		2,288	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			960	2,686	(1)		179		461	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1,751	9,861	221	(111)	(571)		14	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(11,518)	(62)	209,819	5,767	17,110	9,658	15,011	96,985	38	20,824
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(11,519)		155,013		14,398	3,389		97,727	371	(6,784)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				1,527	2,629	(15)	15,012		(299)	
1230	Kredit dalam Valas	1	(62)	54,806	4,239	83	6,283	(1)	(742)	(34)	27,607
1300	Modal Saham dan Penyertaan		288	(255)	9,746	38,813	5,255	44,806		(169)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(7,860)	5,061	3,289	3,076	23,739	3,966	10,930		5,020	59,251
1410	Surat Berharga Pemerintah	(7,860)		(464)		13,904					59,251
1420	Surat Berharga Lainnya		5,061	3,753	3,076	9,835	3,966	10,930		5,020	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					389	47,426	5,747			
1800	Kredit Dagang					1,533	(2)	43,033	45,846		
2000	Rekening Antar Bank	(1,642)	87,668	80,719	4,409	1,192	30	158			
9000	Rupa-rupa	62,395	73,803	8,811	10,234	7,318	9,523	238,941	261,572	2,687	(115,864)
	TOTAL	194,614	194,614	300,924	300,924	95,281	95,281	645,852	645,852	132,872	132,872

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2007) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2007) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	40,594		502,550		2,782		984,574	GROSS SAVING	0100
75,508		610,246				984,574		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(34,914)		(107,696)		2,782				NET LENDING/BORROWING	0300
		0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(34,914)		(107,696)		2,782				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
106,512		918,057		230,651		2,325,943		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	141,426		1,025,754		227,869		2,325,943	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					157,378	157,378	157,378	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		12,732	16,578	17,315	15,858	33,330	33,330	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
27,513		116,379		6,572	(16,737)	259,056	259,056	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2,235		30,914		2,924	(17,698)	12,953	12,953	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
25,278		85,464		3,648	960	246,103	246,103	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3,231		12,925				42,213	42,213	CURRENCY AND COIN	1021
17,849		40,174		2,921		65,105	65,105	DEMAND DEPOSITS	1022
(349)		(91)		(625)		102,060	102,060	SAVING DEPOSITS	1023
4,074		31,117		1,117		33,079	33,079	TIME DEPOSITS	1024
473		1,340		235	960	3,646	3,646	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
								POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
271	632	2,116	14,410	17,320	(3,670)	21,123	21,123	SHORT TERM SECURITIES	1100
187	12,140	1,793	279,188	193,139	1,079	425,579	425,579	CREDIT	1200
	(488)	148	64,822		(256)	158,411	158,411	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
187	1,396	634	16,848	1,594		19,757	19,757	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11,232	1,010	197,518	191,544	1,335	247,410	247,410	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	101,356	542,966	641,936	132,278	(142)	758,438	758,438	STOCK AND PARTICIPATION	1300
2,887	1,960	5,913	5,539	32,180	(2,755)	76,098	76,098	LONG TERM SECURITIES	1400
		15,004		38,666		59,251	59,251	GOVERNMENT BONDS	1410
2,887	1,960	(9,091)	5,539	(6,485)	(2,755)	16,847	16,847	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	2,688	43,979				50,114	50,114	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
2,830	11,518	82,352	63,083	3,208	12,512	132,956	132,956	TRADE CREDITS	1800
		1,769		9,912		92,107	92,107	INTERBANK CLAIMS	2000
72,824	11,131	108,059	5,019	(181,273)	64,346	319,764	319,764	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
182,020	182,020	1,528,303	1,528,303	230,651	230,651	3,310,517	3,310,517	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 4. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		18,624		50,149		18,608		339,129		229,473
0200	Investasi Nonfinansial	176		6,154		2,939		186,531		178,635	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	18,448		43,995		15,668		152,598		50,838	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500					0					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	18,448		43,995		15,668		152,598		50,838	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(104,120)		331,247		60,336		284,167		130,306	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(122,568)		287,252		44,668		131,569		79,468
0800	Cadangan Valas Pemerintah	44,180									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	234		16,651	3,841	10	(191)		130		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(16,229)	120,450	74,645	267,600	7,829		181,491		115,100	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(16,229)	54,377	57,950	83,132	(1,039)		28,574		54,422	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		66,074	16,694	184,468	8,868		139,751		60,678	
1021	Uang Kertas dan Logam		43,605	16,825		1,339		10,712		1,339	
1022	Giro		22,480		(2,941)	35		(3,852)		45,226	
1023	Tabungan		(12)		43,161	(63)		42,268		88	
1024	Deposito Berjangka				138,247	7,538		90,518		8,755	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(131)	6,001	18		104		5,270	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							13,166			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			9,334	(9,276)	68	370	(341)		(4)	0
1200	Kredit (Jumlah)	47	713	317,593	13,379	32,385	32,200	14,916	189,139	(100)	142,218
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	42		273,911		29,218	8,479		154,845	(320)	506
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rupiah				(82)	2,834		14,916	34,192	204	
1230	Kredit dalam Valas	4	713	43,682	13,461	332	23,721		102	17	141,712
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	522	1,056	(11,727)	(2,242)	3,118	10,727		(3,559)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	2,471	12,990	(12,493)	(222)	17,989	(1,641)	(36)		12,985	50,225
1410	Surat Berharga Pemerintah	2,471		(12,242)		17,830					50,225
1420	Surat Berharga Lainnya		12,990	(250)	(222)	158	(1,641)	(36)		12,985	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					532	9,368	10,469			
1800	Kredit Dagang					1,753	3,976	(24,065)	(4,017)		
2000	Rekening Antar Bank	2,234	(124,323)	(88,564)	9,194	(7,084)	26	(154)			
9000	Rupa-rupa	(137,056)	(132,920)	13,024	14,463	9,097	(2,558)	91,160	(53,683)	5,883	(112,975)
	TOTAL	(103,944)	(103,944)	337,401	337,401	63,275	63,275	470,698	470,698	308,941	308,941

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2008 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2008 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	64,475		825,057		(36,684)		1,508,831	GROSS SAVING	0100
114,542		1,019,853				1,508,831		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(50,067)		(194,796)		(36,684)				NET LENDING/BORROWING	0300
						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(50,067)		(194,796)		(36,684)		(0)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
31,120		(255,200)		175,048		652,904		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	81,187		(60,404)		211,732		652,904	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					44,180	44,180	44,180	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	212	(15,280)	13,439	7,752	(8,063)	9,367	9,367	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(7,650)		78,439	13,166	12,383	44,792	446,007	446,007	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(3,631)		45,909		16,475	44,922	182,431	182,431	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
(4,019)		32,530		(4,091)	(131)	250,411	250,411	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,678		10,712				43,605	43,605	CURRENCY AND COIN	1021
(16,536)		(871)		(4,462)		19,539	19,539	DEMAND DEPOSITS	1022
(397)		735		516		43,149	43,149	SAVING DEPOSITS	1023
10,576		20,916		(57)		138,247	138,247	TIME DEPOSITS	1024
(340)		1,038		(89)	(131)	5,870	5,870	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			13,166			13,166	13,166	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(79)	(1,026)	954	12,505	2	7,361	9,934	9,934	SHORT TERM SECURITIES	1100
935	11,766	30,034	358,150	369,071	17,316	764,881	764,881	CREDIT	1200
	12,442	(92)	126,265		222	302,760	302,760	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
935	2,462	14,186	(3,307)	191		33,265	33,265	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(3,139)	15,941	235,192	368,880	17,094	428,856	428,856	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	24,679	(672,431)	(782,512)	(58,283)	41,189	(724,731)	(724,731)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
7,325	(268)	(58,892)	(25,259)	69,203	2,727	38,551	38,551	LONG TERM SECURITIES	1400
		(21,520)		63,686		50,225	50,225	GOVERNMENT BONDS	1410
7,325	(268)	(37,372)	(25,259)	5,517	2,727	(11,674)	(11,674)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	3,899	2,266				13,267	13,267	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
4	18	397,244	380,077	9,169	4,050	384,104	384,104	TRADE CREDITS	1800
		(2,001)		(19,534)		(115,102)	(115,102)	INTERBANK CLAIMS	2000
30,586	41,909	(15,532)	(29,971)	(214,715)	58,181	(217,554)	(217,554)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
145,662	145,662	764,653	764,653	175,048	175,048	2,161,734	2,161,734	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 5. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/ FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		(5,054)		83,509		40,695		398,812		156,139
0200	Investasi Nonfinansial	302		5,454		6,205		215,304		186,602	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(5,356)		78,055		34,489		183,508		(30,463)	
0400	Selisih Statistik = 0300-	(0)								0	
0500	Inv. Finansial Neto = 060	(5,356)		78,055		34,489		183,508		(30,463)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansi	122,131		255,916		240,469		268,802		38,718	
0700	Jumlah Sumber Finansial		127,487		177,861		205,980		85,293		69,180
0800	Cadangan Valas Pemerintah	139,516									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(751)		(13,156)	(3,518)	4	(2,930)		(239)		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah	(9,642)	21,748	50,654	205,476	9,640		177,184		(10,467)	
1010	Uang & Simpanan dalam Val	(9,642)	7,809	52,611	12,092	(14)		10,223		7,963	
1020	Uang & Simpanan dalam Rup		13,939	(1,957)	193,384	9,654		166,656		(18,430)	
1021	Uang Kertas dan Logam		14,638	(1,621)		774		6,504		813	
1022	Giro		(711)	36	30,367	195		23,414		(13,535)	
1023	Tabungan		12		82,898	345		79,970		(193)	
1024	Deposito Berjangka				83,615	8,285		56,441		93	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(372)	(3,496)	56		328		(5,608)	
1030	Tabungan Giro Pos dan Kop							305			
1100	Surat Berharga Jangka Pen			1,837	1,986	(82)	(184)	219		(5)	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(751)	(1,754)	130,640	(2,807)	9,067	(3,029)	2,017	110,995	(856)	21,024
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(719)		174,728			6,975		106,821		1,343
1220	Kredit Institusi Lain dal				2,502	5,053	(185)	2,017	1,996	(776)	
1230	Kredit dalam Valas	(32)	(1,754)	(44,088)	(5,309)	4,014	(9,819)		2,178	(80)	19,681
1300	Modal Saham dan Penyertaa	(50)	25,028	3,287	12,909	66,851	13,964	93,150		1,955	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Ju	(626)	(6,866)	(8,779)	2,494	85,729	3,551	19,932		(6,866)	110,679
1410	Surat Berharga Pemerintah	(626)		(9,004)		58,425		7,250			110,679
1420	Surat Berharga Lainnya		(6,866)	225	2,494	27,305	3,551	12,682		(6,866)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pen					797	105,786	6,324			
1800	Kredit Dagang						(1)	(22,046)	(12,289)		
2000	Rekening Antar Bank	(3,419)	105,693	71,206	(3,816)	2,185		74			
9000	Rupa-rupa	(2,144)	(16,363)	20,227	(34,864)	66,277	88,822	(8,053)	(13,173)	54,955	(62,522)
	TOTAL	122,433	122,433	261,369	261,369	246,675	246,675	484,106	484,106	225,319	225,319

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif
*) Angka sementara

INDONESIA, 2009 *) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2009 *) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	52,351		971,763		38,903		1,737,117	GROSS SAVING	0100
110,366		1,212,884				1,737,117		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(58,015)		(241,122)		38,903				NET LENDING/BORROWING	0300
						(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(58,015)		(241,122)		38,903		0		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
242,639		1,827,562		278,527		3,274,763		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	300,654		2,068,683		239,624		3,274,763	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					139,516	139,516	139,516	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	(212)	2,182	(3,160)	(528)	(2,191)	(12,249)	(12,249)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
4,314		89,695	305	(10,417)	73,432	300,961	300,961	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
7,466		36,961		(11,899)	73,768	93,670	93,670	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
(3,152)		52,733		1,482	(336)	206,987	206,987	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,626		6,543				14,638	14,638	CURRENCY AND COIN	1021
2,070		16,348		1,164	36	29,692	29,692	DEMAND DEPOSITS	1022
5		2,613			171	82,910	82,910	SAVING DEPOSITS	1023
(7,325)		25,993			128	83,615	83,615	TIME DEPOSITS	1024
472		1,237		19	(372)	(3,868)	(3,868)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
			305			305	305	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
235	34	631	5,447	1,394	(3,054)	4,229	4,229	SHORT TERM SECURITIES	1100
(63)	19,040	3,519	114,221	117,570	3,453	261,143	261,143	CREDIT	1200
	13,713		45,252		(95)	174,009	174,009	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(63)	943	3,519	3,944	(551)		9,200	9,200	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	4,384		65,025	118,121	3,548	77,934	77,934	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
212,688	251,339	433,015	840,879	339,537	6,312	1,150,432	1,150,432	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1,087	24,213	(57,076)	(13,793)	92,627	5,750	126,029	126,029	LONG TERM SECURITIES	1400
		(25,109)		79,744		110,679	110,679	GOVERNMENT BONDS	1410
1,087	24,213	(31,966)	(13,793)	12,883	5,750	15,350	15,350	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
78		98,587				105,786	105,786	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
11,178	(28,757)	192,402	202,834	(874)	18,873	180,660	180,660	TRADE CREDITS	1800
		(3,904)		35,734		101,877	101,877	INTERBANK CLAIMS	2000
13,123	34,997	1,068,511	921,950	(296,516)	(2,467)	916,379	916,379	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
353,006	353,006	3,040,446	3,040,446	278,527	278,527	5,011,880	5,011,880	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative
*) Preliminary Figures

TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 6. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		(27,515)		36,403		22,565		453,696		219,436
0200	Investasi Nonfinansial	350		1,189		13,587		217,781		168,114	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(27,864)		35,214		8,978		235,915		51,322	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500										
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(27,864)		35,214		8,978		235,915		51,322	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	260,048		476,601		149,526		373,035		66,871	
0700	Jumlah Sumber Finansial		287,912		441,387		140,548		137,120		15,548
0800	Cadangan Valas Pemerintah	227,485									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(665)		(37)	(6,294)	(31)	2,819		24		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	14,344	76,620	(35,494)	388,209	31,302		248,490		13,572	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	14,344	5,353	(41,507)	40,564	1,031		24,720		5,042	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		71,267	6,013	347,646	30,271		222,942		8,531	
1021	Uang Kertas dan Logam		39,547	5,357		2,465		13,676		1,709	
1022	Giro		31,731	17	38,696	4,877		22,152		(41)	
1023	Tabungan		(11)		120,962	944		113,055		228	
1024	Deposito Berjangka				175,476	21,934		66,840		5,919	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			639	12,512	51		7,220		716	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koper							828			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			23,136	(327)	5,757	1,560	(736)		(6)	81
1200	Kredit (Jumlah)	(247)	(527)	330,185	4,693	49,670	39,392	5,589	92,642	(899)	(10,346)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(247)		266,714			21,627		75,720		(324)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rupiah				4,200	47,419	178	5,589	10,978	(877)	
1230	Kredit dalam Valas		(527)	63,471	493	2,251	17,587		5,944	(22)	(10,023)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(224)		2,126	30,068	47,840	9,185	68,883	0	(4,792)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(4,468)	(3,647)	(28,105)	(1,034)	22,087	(13,598)	846		2,954	87,436
1410	Surat Berharga Pemerintah	(4,468)		(37,092)		3,876		(797)		6,755	87,436
1420	Surat Berharga Lainnya		(3,647)	8,987	(1,034)	18,211	(13,598)	1,644		(3,801)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					2	49,419	8,211			
1800	Kredit Dagang						3	(15,627)	(19,114)		
2000	Rekening Antar Bank	(1,709)	196,188	201,849	15,619	1,977		(150)			
9000	Rupa-rupa	25,530	19,278	(17,059)	10,452	(9,078)	51,768	57,529	63,568	56,042	(61,623)
	TOTAL	260,398	260,398	477,790	477,790	163,113	163,113	590,816	590,816	234,984	234,984

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif
**) Angka Sangat Sementara

INDONESIA, 2010 **)(Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2010 **)(IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	7,787		1,298,112		76,143		2,086,629	GROSS SAVING	0100
28,100		1,657,508				2,086,629		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(20,313)		(359,395)		76,143				NET LENDING/BORROWING	0300
								STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(20,313)		(359,395)		76,143				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
11,129		1,696,827		287,135		3,321,171		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	31,442		2,056,222		210,992		3,321,171	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					227,485	227,485	227,485	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	28	(19,530)	(6,089)	(8,996)	(19,749)	(29,260)	(29,260)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
26,173		108,890	828	21,686	(36,694)	428,964	428,964	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(4,265)		(1,173)		10,376	(37,350)	8,567	8,567	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEP	1010
30,439		110,063		11,310	656	419,569	419,569	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3,419		12,920				39,547	39,547	CURRENCY AND COIN	1021
9,528		27,286		6,625	17	70,444	70,444	DEMAND DEPOSITS	1022
261		5,853		611		120,951	120,951	SAVING DEPOSITS	1023
17,474		61,754		1,556		175,476	175,476	TIME DEPOSITS	1024
(244)		2,250		2,518	639	13,151	13,151	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			828			828	828	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1,115	2,914	(2,630)	22,512	(5,697)	(5,800)	20,939	20,939	SHORT TERM SECURITIES	1100
(6,162)	22,850	69,467	320,580	29,822	8,141	477,425	477,425	CREDIT	1200
	12,178		156,962		304	266,467	266,467	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(6,162)	(350)	11,986	44,323	1,375		59,330	59,330	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11,022	57,481	119,295	28,447	7,836	151,628	151,628	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	5	901,794	1,366,950	398,372	7,792	1,414,000	1,414,000	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(2,737)	915	8,165	40,190	115,712	4,192	114,454	114,454	LONG TERM SECURITIES	1400
		10,805		108,357		87,436	87,436	GOVERNMENT BONDS	1410
(2,737)	915	(2,640)	40,190	7,355	4,192	27,018	27,018	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
(140)		41,346				49,419	49,419	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERV.	1500
(751)	5,484	53,618	45,021	1,470	7,316	38,710	38,710	TRADE CREDITS	1800
		(905)		10,744		211,807	211,807	INTERBANK CLAIMS	2000
(6,369)	(754)	536,612	266,229	(275,978)	18,309	367,227	367,227	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
39,229	39,229	3,354,334	3,354,334	287,135	287,135	5,407,799	5,407,799	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative
**) Very Preliminary Figures

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 4

**Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor
2005 - 2010**

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		17,138		17,256		(15,432)
0200	Investasi Nonfinansial	556		243		283	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16,582		17,013		(15,715)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0				0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,582		17,013		(15,715)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	30,845		126,964		194,331	
0700	Jumlah Sumber Finansial		14,262		109,951		210,046
0800	Cadangan Valas Pemerintah	4,090		29,423		157,378	
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(997)		(729)		121	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(1,220)	19,329	13,228	(76,335)	(4,543)	43,289
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1,220)	3,206	13,228	(8,458)	(4,543)	(4,626)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		16,123		(67,876)		47,914
1021	Uang Kertas dan Logam		17,975		33,703		42,213
1022	Giro		(1,895)		(101,324)		5,698
1023	Tabungan		43		(256)		3
1024	Deposito Berjangka						
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek						
1200	Kredit (Jumlah)	(13,715)	(4,491)	(156)	(5,834)	(11,518)	(62)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(13,716)		(154)		(11,519)	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp						
1230	Kredit dalam Valas	2	(4,491)	(2)	(5,834)	1	(62)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	(79)	44	(117)		288
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	20,322	7,139	11,810	13,626	(7,860)	5,061
1410	Surat Berharga Pemerintah	20,322	8,582	11,810	14,349	(7,860)	
1420	Surat Berharga Lainnya		(1,443)		(724)		5,061
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	(722)	11,536	167	142,713	(1,642)	87,668
9000	Rupa-rupa	23,086	(19,172)	73,178	35,898	62,395	73,803
	JUMLAH	31,400	31,400	127,207	127,207	194,614	194,614

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BANK SENTRAL, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR CENTRAL BANK SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	18,624		(5,054)		(27,515)	GROSS SAVING	0100
176		302		350		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
18,448		(5,356)		(27,864)		NET LENDING/BORROWING	0300
18,448		(5,356)		(27,864)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
(104,120)		122,131		260,048		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	(122,568)		127,487		287,912	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
44,180		139,516		227,485		OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
234		(751)		(665)		OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(16,229)	120,450	(9,642)	21,748	14,344	76,620	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(16,229)	54,377	(9,642)	7,809	14,344	5,353	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
	66,074		13,939		71,267	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
	43,605		14,638		39,547	CURRENCY AND COIN	1021
	22,480		(711)		31,731	DEMAND DEPOSITS	1022
	(12)		12		(11)	SAVING DEPOSITS	1023
						TIME DEPOSITS	1024
						OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
						SHORT TERM SECURITIES	1100
47	713	(751)	(1,754)	(247)	(527)	CREDIT	1200
42		(719)		(247)		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
						OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
4	713	(32)	(1,754)		(527)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(0)	522	(50)	25,028	(224)		STOCK AND PARTICIPATION	1300
2,471	12,990	(626)	(6,866)	(4,468)	(3,647)	LONG TERM SECURITIES	1400
2,471		(626)		(4,468)		GOVERNMENT BONDS	1410
	12,990		(6,866)		(3,647)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
2,234	(124,323)	(3,419)	105,693	(1,709)	196,188	INTERBANK CLAIMS	2000
(137,056)	(132,920)	(2,144)	(16,363)	25,530	19,278	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
(103,944)	(103,944)	122,433	122,433	260,398	260,398	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P U	S S	P U	S S	P U	S S
0100	Tabungan Bruto		45,511		27,613		24,690
0200	Investasi Nonfinansial	4,314		2,891		2,876	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	41,197		24,722		21,814	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	41,197		24,722		21,814	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	196,786		229,329		298,047	
0700	Jumlah Sumber Finansial		155,589		204,607		276,233
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	691	(438)	(6,295)	(5,711)	3,162	637
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	50,122	170,954	(14,690)	161,175	(9,249)	232,504
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	46,980	54,810	(21,812)	(4,746)	(20,110)	35,276
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	3,142	116,144	7,122	165,921	10,861	197,229
1021	Uang Kertas dan Logam	3,003		7,031		9,900	
1022	Giro	(0)	22,950	(1)	57,241		59,407
1023	Tabungan		(13,892)		52,904		102,057
1024	Deposito Berjangka		107,041		55,261		33,079
1025	Simpanan Rupiah lainnya	139	45	92	515	960	2,686
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	5,116	(211)	2,127	6,282	1,751	9,861
1200	Kredit (Jumlah)	144,974	5,148	99,969	(608)	209,819	5,767
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	134,594		75,599		155,013	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp		2,929		(2,550)		1,527
1230	Kredit dalam Valas	10,380	2,219	24,370	1,942	54,806	4,239
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(65)	3,806	(106)	8,694	(255)	9,746
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(1,107)	790	(9,721)	1,828	3,289	3,076
1410	Surat Berharga Pemerintah	(806)		(11,505)		(464)	
1420	Surat Berharga Lainnya	(301)	790	1,784	1,828	3,753	3,076
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	4,839	3,658	156,564	22,045	80,719	4,409
9000	Rupa-rupa	(7,784)	(28,119)	1,481	10,902	8,811	10,234
	JUMLAH	201,100	201,100	232,220	232,220	300,924	300,924

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PERBANKAN, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR BANKING SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/ YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	50,149		83,509		36,403	GROSS SAVING	0100
6,154		5,454		1,189		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
43,995		78,055		35,214		NET LENDING/BORROWING	0300
43,995		78,055		35,214		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
43,995		78,055		35,214		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
331,247		255,916		476,601		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	287,252		177,861		441,387	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
16,651	3,841	(13,156)	(3,518)	(37)	(6,294)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
74,645	267,600	50,654	205,476	(35,494)	388,209	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
57,950	83,132	52,611	12,092	(41,507)	40,564	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
16,694	184,468	(1,957)	193,384	6,013	347,646	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
16,825		(1,621)		5,357		CURRENCY AND COIN	1021
	(2,941)	36	30,367	17	38,696	DEMAND DEPOSITS	1022
	43,161		82,898		120,962	SAVING DEPOSITS	1023
	138,247		83,615		175,476	TIME DEPOSITS	1024
(131)	6,001	(372)	(3,496)	639	12,512	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
9,334	(9,276)	1,837	1,986	23,136	(327)	SHORT TERM SECURITIES	1100
317,593	13,379	130,640	(2,807)	330,185	4,693	CREDIT	1200
273,911		174,728		266,714		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
	(82)		2,502		4,200	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
43,682	13,461	(44,088)	(5,309)	63,471	493	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
1,056	(11,727)	3,287	12,909	2,126	30,068	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(12,493)	(222)	(8,779)	2,494	(28,105)	(1,034)	LONG TERM SECURITIES	1400
(12,242)		(9,004)		(37,092)		GOVERNMENT BONDS	1410
(250)	(222)	225	2,494	8,987	(1,034)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
(88,564)	9,194	71,206	(3,816)	201,849	15,619	INTERBANK CLAIMS	2000
13,024	14,463	20,227	(34,864)	(17,059)	10,452	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
337,401	337,401	261,369	261,369	477,790	477,790	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		10,801		8,815		19,386
0200	Investasi Nonfinansial	1,036		1,567		199	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	9,764		7,249		19,187	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	9,764		7,249		19,187	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	53,834		30,887		95,082	
0700	Jumlah Sumber Finansial		44,070		23,638		75,895
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(13)	53	(25)	98	0	149
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	6,826		12,470		4,766	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	1,210		(730)		2,475	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	5,616		13,200		2,291	
1021	Uang Kertas dan Logam	749		1,334		1,616	
1022	Giro	(672)		1,016		2,694	
1023	Tabungan	227		372		(393)	
1024	Deposito Berjangka	5,295		10,522		(1,625)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	16		(43)		(1)	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	422	418	35	(409)	221	(111)
1200	Kredit (Jumlah)	1,672	15,127	(123)	6,636	17,110	9,658
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		4,992		5,441	14,398	3,389
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	1,753	1,549	(123)	1,321	2,629	(15)
1230	Kredit dalam Valas	(80)	8,586		(126)	83	6,283
1300	Modal Saham dan Penyertaan	3,633	1,132	(136)	3,643	38,813	5,255
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	17,760	3,900	4,689	(8)	23,739	3,966
1410	Surat Berharga Pemerintah	11,043		3,567		13,904	
1420	Surat Berharga Lainnya	6,717	3,900	1,122	(8)	9,835	3,966
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	1,383	17,329	4,363	20,976	389	47,426
1800	Kredit Dagang	13,493	8,854	29,784	(5,904)	1,533	(2)
2000	Rekening Antar Bank	4,149	(24)	7,672	13	1,192	30
9000	Rupa-rupa	4,509	(2,720)	(27,841)	(1,406)	7,318	9,523
	JUMLAH	54,871	54,871	32,454	32,454	95,281	95,281

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif
 *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR NON BANK FINANCIAL SECTORS, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	18,608		40,695		22,565	GROSS SAVING	0100
2,939		6,205		13,587		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
15,668		34,489		8,978		NET LENDING/BORROWING	0300
0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
15,668		34,489		8,978		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
60,336		240,469		149,526		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	44,668		205,980		140,548	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
10	(191)	4	(2,930)	(31)	2,819	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
7,829		9,640		31,302		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(1,039)		(14)		1,031		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
8,868		9,654		30,271		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,339		774		2,465		CURRENCY AND COIN	1021
35		195		4,877		DEMAND DEPOSITS	1022
(63)		345		944		SAVING DEPOSITS	1023
7,538		8,285		21,934		TIME DEPOSITS	1024
18		56		51		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
68	370	(82)	(184)	5,757	1,560	SHORT TERM SECURITIES	1100
32,385	32,200	9,067	(3,029)	49,670	39,392	CREDIT	1200
29,218	8,479		6,975		21,627	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
2,834		5,053	(185)	47,419	178	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
332	23,721	4,014	(9,819)	2,251	17,587	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(2,242)	3,118	66,851	13,964	47,840	9,185	STOCK AND PARTICIPATION	1300
17,989	(1,641)	85,729	3,551	22,087	(13,598)	LONG TERM SECURITIES	1400
17,830		58,425		3,876		GOVERNMENT BONDS	1410
158	(1,641)	27,305	3,551	18,211	(13,598)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
532	9,368	797	105,786	2	49,419	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
1,753	3,976		(1)		3	TRADE CREDITS	1800
(7,084)	26	2,185		1,977		INTERBANK CLAIMS	2000
9,097	(2,558)	66,277	88,822	(9,078)	51,768	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
63,275	63,275	246,675	246,675	163,113	163,113	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		191,768		180,262		241,342
0200	Investasi Nonfinansial	33,425		31,417		161,772	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	158,343		148,845		79,571	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0				0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	158,343		148,845			
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	257,427		237,046		484,081	
0700	Jumlah Sumber Finansial		99,084		88,201		404,510
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		63		(70)		108
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	120,784		84,189		126,026	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	19,859		(5,526)		3,844	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	75,125		80,522		122,182	
1021	Uang Kertas dan Logam	5,989		10,669		12,925	
1022	Giro	(684)		9,362		8,679	
1023	Tabungan	(15,265)		43,461		104,291	
1024	Deposito Berjangka	85,059		17,021		(3,892)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	26		9		179	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi	25,800		9,193			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	178		126		(571)	
1200	Kredit (Jumlah)	68	85,828	(57)	65,197	15,011	96,985
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		86,840		64,781		97,727
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	68	(835)	(57)	(1,547)	15,012	
1230	Kredit dalam Valas		(176)	(0)	1,963	(1)	(742)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	50,211		34,824	(200)	44,806	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	13,200		1		10,930	
1410	Surat Berharga Pemerintah	(1,850)					
1420	Surat Berharga Lainnya	15,050		1		10,930	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	16,106		16,813		5,747	
1800	Kredit Dagang	6,477	10,197	19,259	21,787	43,033	45,846
2000	Rekening Antar Bank	4,237		51		158	
9000	Rupa-rupa	46,167	2,995	81,839	1,487	238,941	261,572
	JUMLAH	290,852	290,852	268,463	268,463	645,852	645,852

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR RUMAH TANGGA, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR HOUSEHOLD SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	339,129		398,812		453,696	GROSS SAVING	0100
186,531		215,304		217,781		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
152,598		183,508		235,915		NET LENDING/BORROWING	0300
152,598		183,508		235,915		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
152,598		183,508		235,915		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
284,167		268,802		373,035		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	131,569		85,293		137,120	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	130		(239)		24	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
181,491		177,184		248,490		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
28,574		10,223		24,720		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
139,751		166,656		222,942		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
10,712		6,504		13,676		CURRENCY AND COIN	1021
(3,852)		23,414		22,152		DEMAND DEPOSITS	1022
42,268		79,970		113,055		SAVING DEPOSITS	1023
90,518		56,441		66,840		TIME DEPOSITS	1024
104		328		7,220		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
13,166		305		828		POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(341)		219		(736)		SHORT TERM SECURITIES	1100
14,916	189,139	2,017	110,995	5,589	92,642	CREDIT	1200
	154,845		106,821		75,720	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
14,916	34,192	2,017	1,996	5,589	10,978	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	102		2,178		5,944	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
10,727		93,150		68,883	0	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(36)		19,932		846		LONG TERM SECURITIES	1400
		7,250		(797)		GOVERNMENT BONDS	1410
(36)		12,682		1,644		OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
10,469		6,324		8,211		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
(24,065)	(4,017)	(22,046)	(12,289)	(15,627)	(19,114)	TRADE CREDITS	1800
(154)		74		(150)		INTERBANK CLAIMS	2000
91,160	(53,683)	(8,053)	(13,173)	57,529	63,568	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
470,698	470,698	484,106	484,106	590,816	590,816	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		108,813		181,082		168,661
0200	Investasi Nonfinansial	90,213		113,721		133,690	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	18,600		67,361		34,972	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	18,600		67,361		34,971	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	55,067		98,784		(818)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		36,467		31,423		(35,789)
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	97	(69)	(184)	64		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	32,275		2,425		(8,408)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	3,443		(11,033)		(4,788)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	28,832		13,458		(3,620)	
1021	Uang Kertas dan Logam	749		1,334		1,616	
1022	Giro	22,395		1,419		(7,211)	
1023	Tabungan	388		1,508		(773)	
1024	Deposito Berjangka	4,623		8,931		2,288	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	678		266		461	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(8)			(0)	14	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(689)	(31,712)	506	(67,241)	38	20,824
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(12,734)		898	371	(6,784)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(385)		321		(299)	
1230	Kredit dalam Valas	(304)	(18,977)	185	(68,139)	(34)	27,607
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(7,934)		5,680		(169)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	7,213	13,598	15,917	32,284	5,020	59,251
1410	Surat Berharga Pemerintah	8,582	13,598	14,349	32,284		59,251
1420	Surat Berharga Lainnya	(1,369)		1,568		5,020	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	24,113	54,649	74,440	66,316	2,687	(115,864)
	JUMLAH	145,280	145,280	212,505	212,505	132,872	132,872

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif
 *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

SEKTOR PEMERINTAH, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR GENERAL GOVERNMENT SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	229,473		156,139		219,436	GROSS SAVING	0100
178,635		186,602		168,114		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
		(30,463)		51,322		NET LENDING/BORROWING	0300
50,838		0				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
		(30,463)		51,322		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
50,838						TOTAL FINANCIAL USES	0600
130,306		38,718		66,871		TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	79,468		69,180		15,548	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
						OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
		(10,467)		13,572		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
115,100		7,963		5,042		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
54,422		(18,430)		8,531		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
60,678		813		1,709		CURRENCY AND COIN	1021
1,339		(13,535)		(41)		DEMAND DEPOSITS	1022
45,226		(193)		228		SAVING DEPOSITS	1023
88		93		5,919		TIME DEPOSITS	1024
8,755		(5,608)		716		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
5,270						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(4)	0	(5)	(0)	(6)	81	SHORT TERM SECURITIES	1100
						CREDIT	1200
(100)	142,218	(856)	21,024	(899)	(10,346)	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(320)	506		1,343		(324)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
204		(776)		(877)		LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
17	141,712	(80)	19,681	(22)	(10,023)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(3,559)		1,955		(4,792)		LONG TERM SECURITIES	1400
12,985	50,225	(6,866)	110,679	2,954	87,436	GOVERNMENT BONDS	1410
	50,225		110,679	6,755	87,436	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
12,985		(6,866)		(3,801)		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
5,883	(112,975)	54,955	(62,522)	56,042	(61,623)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
308,941	308,941	225,319	225,319	234,984	234,984	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		3,833		3,708		40,594
0200	Investasi Nonfinansial	70,456		78,006		75,508	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(66,623)		(74,298)		(34,914)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(66,623)		(74,298)		(34,914)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	73,375		12,952		106,512	
0700	Jumlah Sumber Finansial		139,998		87,250		141,426
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya						
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	15,646		11,642		27,513	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	8,586		5,683		2,235	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	7,060		5,959		25,278	
1021	Uang Kertas dan Logam	1,497		2,667		3,231	
1022	Giro	(741)		155		17,849	
1023	Tabungan	(139)		1,148		(349)	
1024	Deposito Berjangka	6,558		2,012		4,074	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(115)		(24)		473	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	1,255	(5)	49	(275)	271	632
1200	Kredit (Jumlah)	27	3,916	(59)	10,564	187	12,140
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		2,637		2,876		(488)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	27	58	(59)	(30)	187	1,396
1230	Kredit dalam Valas		1,221		7,718		11,232
1300	Modal Saham dan Penyertaan	19,221	44,239	7,670	65,774		101,356
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	1,715	3,637	583	40	2,887	1,960
1410	Surat Berharga Pemerintah	(192)		(472)			
1420	Surat Berharga Lainnya	1,907	3,637	1,055	40	2,887	1,960
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		590		600		2,688
1800	Kredit Dagang	7,782	21,183	5,762	8,077	2,830	11,518
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	27,729	66,438	(12,694)	2,469	72,824	11,131
	JUMLAH	143,831	143,831	90,958	90,958	182,020	182,020

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR GOVERNMENT ENTERPRISES SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	64,475		52,351		7,787	GROSS SAVING	0100
114,542		110,366		28,100		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(50,067)		(58,015)		(20,313)		NET LENDING/BORROWING	0300
(50,067)		(58,015)		(20,313)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
31,120		242,639		11,129		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	81,187		300,654		31,442	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	212		(212)		28	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(7,650)		4,314		26,173		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(3,631)		7,466		(4,265)		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(4,019)		(3,152)		30,439		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,678		1,626		3,419		CURRENCY AND COIN	1021
(16,536)		2,070		9,528		DEMAND DEPOSITS	1022
(397)		5		261		SAVING DEPOSITS	1023
10,576		(7,325)		17,474		TIME DEPOSITS	1024
(340)		472		(244)		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(79)	(1,026)	235	34	1,115	2,914	SHORT TERM SECURITIES	1100
935	11,766	(63)	19,040	(6,162)	22,850	CREDIT	1200
	12,442		13,713		12,178	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
935	2,462	(63)	943	(6,162)	(350)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(3,139)		4,384		11,022	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	24,679	212,688	251,339		5	STOCK AND PARTICIPATION	1300
7,325	(268)	1,087	24,213	(2,737)	915	LONG TERM SECURITIES	1400
						GOVERNMENT BONDS	1410
7,325	(268)	1,087	24,213	(2,737)	915	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	3,899	78		(140)		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
4	18	11,178	(28,757)	(751)	5,484	TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
30,586	41,909	13,123	34,997	(6,369)	(754)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
145,662	145,662	353,006	353,006	39,229	39,229	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/ YEAR					
		2005		2006		2007	
		P U	S S	P U	S S	P U	S S
0100	Tabungan Bruto		432,804		467,893		502,550
0200	Investasi Nonfinansial	538,726		620,324		610,246	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(105,922)		(152,431)		(107,696)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500					0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(105,922)		(152,431)		(107,696)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	146,802		323,518		918,057	
0700	Jumlah Sumber Finansial		252,724		475,949		1,025,754
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	10,188	16,386	(51,331)	(58,753)	12,732	16,578
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	41,914	25,800	53,085	9,193	116,379	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	30,144		(1,514)		30,914	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	11,770		54,599		85,464	
1021	Uang Kertas dan Logam	5,989		10,669		12,925	
1022	Giro	(918)		20,647		40,174	
1023	Tabungan	838		5,643		(91)	
1024	Deposito Berjangka	5,757		17,327		31,117	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	103		314		1,340	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi		25,800		9,193		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	2,142	11,010	(3,110)	(1,205)	2,116	14,410
1200	Kredit (Jumlah)	(109)	32,643	1,441	(94,598)	1,793	279,188
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		38,845		943	148	64,822
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(1,209)	(732)	456	256	634	16,848
1230	Kredit dalam Valas	1,100	(5,470)	985	(95,797)	1,010	197,518
1300	Modal Saham dan Penyertaan	56,234	113,259	464,912	519,376	542,966	641,936
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(15,258)	46,558	11,946	16,275	5,913	5,539
1410	Surat Berharga Pemerintah	(35,265)		17,638		15,004	
1420	Surat Berharga Lainnya	20,007	46,558	(5,691)	16,275	(9,091)	5,539
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	430		400		43,979	
1800	Kredit Dagang	12,483	1,392	58,352	59,344	82,352	63,083
2000	Rekening Antar Bank	(4,201)	24	(2,978)		1,769	
9000	Rupa-rupa	42,979	5,652	(209,201)	26,316	108,059	5,019
	JUMLAH	685,528	685,528	943,842	943,842	1,528,303	1,528,303

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BISNIS, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR PRIVATE ENTERPRISES SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P U	S S	P U	S S	P U	S S		
	825,057		971,763		1,298,112	GROSS SAVING	0100
1,019,853		1,212,884		1,657,508		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(194,796)		(241,122)		(359,395)		NET LENDING/BORROWING	0300
(194,796)		(241,122)		(359,395)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(255,200)		1,827,562		1,696,827		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
	(60,404)		2,068,683		2,056,222	TOTAL FINANCIAL USES	0600
						TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(15,280)	13,439	2,182	(3,160)	(19,530)	(6,089)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
78,439	13,166	89,695	305	108,890	828	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
45,909		36,961		(1,173)		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
32,530		52,733		110,063		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
10,712		6,543		12,920		CURRENCY AND COIN	1021
(871)		16,348		27,286		DEMAND DEPOSITS	1022
735		2,613		5,853		SAVING DEPOSITS	1023
20,916		25,993		61,754		TIME DEPOSITS	1024
1,038		1,237		2,250		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
	13,166		305		828	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
954	12,505	631	5,447	(2,630)	22,512	SHORT TERM SECURITIES	1100
30,034	358,150	3,519	114,221	69,467	320,580	CREDIT	1200
(92)	126,265		45,252		156,962	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
14,186	(3,307)	3,519	3,944	11,986	44,323	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
15,941	235,192		65,025	57,481	119,295	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(672,431)	(782,512)	433,015	840,879	901,794	1,366,950	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(58,892)	(25,259)	(57,076)	(13,793)	8,165	40,190	LONG TERM SECURITIES	1400
(21,520)		(25,109)		10,805		GOVERNMENT BONDS	1410
(37,372)	(25,259)	(31,966)	(13,793)	(2,640)	40,190	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
2,266		98,587		41,346		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
397,244	380,077	192,402	202,834	53,618	45,021	TRADE CREDITS	1800
(2,001)		(3,904)		(905)		INTERBANK CLAIMS	2000
(15,532)	(29,971)	1,068,511	921,950	536,612	266,229	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
764,653	764,653	3,040,446	3,040,446	3,354,334	3,354,334	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2005		2006		2007	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(71,942)		(38,460)		2,782
0200	Investasi Nonfinansial						
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(71,942)		(38,460)		2,782	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(71,942)		(38,460)		2,782	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	14,409		44,642		230,651	
0700	Jumlah Sumber Finansial		86,351		83,101		227,869
0800	Cadangan Valas Pemerintah		4,090		29,423		157,378
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	14,861	8,831	(23,089)	(17,280)	17,315	15,858
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	3,679	53,941	(76,257)	(7,943)	6,572	(16,737)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	2,817	53,802	466	(8,034)	2,924	(17,698)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	862	139	(76,724)	91	3,648	960
1021	Uang Kertas dan Logam						
1022	Giro	1,676		(76,682)	(1)	2,921	
1023	Tabungan	102		517		(625)	
1024	Deposito Berjangka	(251)		(551)		1,117	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(664)	139	(7)	92	235	960
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	8,438	6,330	2,205	(2,962)	17,320	(3,670)
1200	Kredit (Jumlah)	(24,494)	1,275	(185,876)	1,531	193,139	1,079
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		299		506		(256)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	2,716		(3,091)		1,594	
1230	Kredit dalam Valas	(27,210)	975	(182,786)	1,026	191,544	1,335
1300	Modal Saham dan Penyertaan	41,236	179	79,044	(5,240)	132,278	(142)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	33,701	1,924	25,991	(2,827)	32,180	(2,755)
1410	Surat Berharga Pemerintah	20,345		11,246		38,666	
1420	Surat Berharga Lainnya	13,355	1,924	14,745	(2,827)	(6,485)	(2,755)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang	1,392		2,331	32,183	3,208	12,512
2000	Rekening Antar Bank	6,892		3,297		9,912	
9000	Rupa-rupa	(71,295)	9,781	216,997	56,215	(181,273)	64,346
	JUMLAH	14,409	14,409	44,642	44,642	230,651	230,651

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LUAR NEGERI, 2005-2010 (MILIAR RUPIAH)
FOR REST OF THE WORLD SECTOR, 2005-2010 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	(36,684)		38,903		76,143	GROSS SAVING	0100
						NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(36,684)		38,903		76,143		NET LENDING/BORROWING	0300
						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(36,684)		38,903		76,143		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
175,048		278,527		287,135		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	211,732		239,624		210,992	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	44,180		139,516		227,485	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
7,752	(8,063)	(528)	(2,191)	(8,996)	(19,749)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
12,383	44,792	(10,417)	73,432	21,686	(36,694)	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
16,475	44,922	(11,899)	73,768	10,376	(37,350)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(4,091)	(131)	1,482	(336)	11,310	656	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
						CURRENCY AND COIN	1021
(4,462)		1,164	36	6,625	17	DEMAND DEPOSITS	1022
516		171		611		SAVING DEPOSITS	1023
(57)		128		1,556		TIME DEPOSITS	1024
(89)	(131)	19	(372)	2,518	639	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
2	7,361	1,394	(3,054)	(5,697)	(5,800)	SHORT TERM SECURITIES	1100
369,071	17,316	117,570	3,453	29,822	8,141	CREDIT	1200
	222		(95)		304	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
191		(551)		1,375		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
368,880	17,094	118,121	3,548	28,447	7,836	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(58,283)	41,189	339,537	6,312	398,372	7,792	STOCK AND PARTICIPATION	1300
69,203	2,727	92,627	5,750	115,712	4,192	LONG TERM SECURITIES	1400
63,686		79,744		108,357		GOVERNMENT BONDS	1410
5,517	2,727	12,883	5,750	7,355	4,192	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
9,169	4,050	(874)	18,873	1,470	7,316	TRADE CREDITS	1800
(19,534)		35,734		10,744		INTERBANK CLAIMS	2000
(214,715)	58,181	(296,516)	(2,467)	(275,978)	18,309	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
175,048	175,048	278,527	278,527	287,135	287,135	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

**TABEL 15. NERACA ARUS DANA SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
TAHUN 2010 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR
NON BANKS FINANCIAL SECTORS, 2010 (IN BILLION RUPIAHS)**

KODE	KATEGORI TRANSAKSI TRANSACTION CATEGORY	ASURANSI		PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		PEGADAIAN		DANA PENSIUN		TOTAL	
		INSURANCES		FINANCE COMPANIES		PAWNSHOPS		PENSION FUNDS		TOTAL	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		9,896		7,384		833		4,453		22,565
0200	Investasi Nonfinansial	27		13,896		133		(469)		13,587	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	9,868		(6,512)		701		4,921		8,978	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500										
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	9,868		(6,512)		701		4,921		8,978	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	84,326		42,954		4,367		17,879		149,526	
0700	Jumlah Sumber Finansial		74,457		49,466		3,667		12,958		140,548
0800	Cadangan Valas Pemerintah										
0900	Klaim dalam Valas Lainnya			(31)	2,819					(31)	2,819
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	17,396		12,507		113		1,285		31,302	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(959)		2,138		(1)		(146)		1,031	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	18,356		10,369		115		1,431		30,271	
1021	Uang Kertas dan Logam	2,086		172		67		140		2,465	
1022	Giro	643		4,183		37		14		4,877	
1023	Tabungan	(252)		1,226		1		(31)		944	
1024	Deposito Berjangka	15,878		4,739		9		1,308		21,934	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	1		50		0		0		51	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	25		1,490	1,560			4,242		5,757	1,560
1200	Kredit (Jumlah)	(281)	408	46,066	34,813	3,885	3,668		504	49,670	39,392
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		423		17,031		3,669		504		21,627
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(281)	19	43,815	160	3,885	(1)			47,419	178
1230	Kredit dalam Valas		(34)	2,251	17,621					2,251	17,587
1300	Modal Saham dan Penyertaan	42,885	2,552	88	6,633			4,868		47,840	9,185
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	18,098	19	631	(13,293)		(267)	3,358	(56)	22,087	(13,598)
1410	Surat Berharga Pemerintah	3,105						771		3,876	
1420	Surat Berharga Lainnya	14,993	19	631	(13,293)		(267)	2,587	(56)	18,211	(13,598)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		44,235			2			5,184	2	49,419
1800	Kredit Dagang						3				3
2000	Rekening Antar Bank	(730)		2,964				(257)		1,977	
9000	Rupa-rupa	6,933	27,244	(20,761)	16,935	366	263	4,384	7,326	(9,078)	51,768
	TOTAL	84,353	84,353	56,850	56,850	4,500	4,500	17,410	17,410	163,113	163,113

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

*Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative*

Daftar Pustaka

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W.I. National Income and Economic Accounting, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.

Badan Pusat Statistik, Studi Neraca Arus Indonesia 1980, Jakarta, 1987.

_____, Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan, berbagai seri, Jakarta.

_____, Pendapatan Nasional Indonesia Triwulanan, Jakarta, berbagai seri.

Bank Indonesia, Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-Bank, Jakarta, 2000.

_____, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, terbit bulanan.

_____, Laporan Perekonomian Indonesia 2010, Jakarta, 2010

Bappepam LK, Kementerian Keuangan RI, Laporan Kegiatan Usaha Peransuransian Indonesia 2010, Jakarta, 2010.

_____, Data Statistik Perusahaan Pembiayaan 2010, Jakarta 2010.

_____, Laporan Tahunan Dana Pensiun 2010, Jakarta, 2010.

_____, Laporan Tahunan Bappepam-LK 2010, Jakarta, 2010.

Board of Governors of the Federal Reserve System, Guide to the Flow of Funds Accounts, Washington, D.C, 2000.

Central Bank of the Philippines, The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983, Manila, 1985.

_____, Flow of Funds Manual of Accounts, Manila, 1983.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operatin and Development, United Nations, and World Bank, System of National Accounts, Brussels/Lexembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.

Copeland, M.A., A study of Money of Flows in the United States, New York, 1952.

Dawson, J.C., Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.

Geehan, Randy, An Analysis of the Indonesia Flow of Funds, Occasional Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.

Geehan, Saldua, and Balances, The Indonesian Flow of Funds, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., National Income and Flow of Funds Analysis, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

Perusahaan Umum Pegadaian, Laporan Tahunan Pegadaian 2010, Jakarta, 2011.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., Principles of money Banking and Financial Markets, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., Ekonomi (Terjemahan), Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

United Nations , Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, Handbook of National Accounting, Public Sector, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 1070
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id